



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Bertanggung Jawab, Berkeadilan, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan
#bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT



BAPPEDA PROV. SUMBAR
Jln. Khatib Sulaiman No.1 Padang
Website : bappeda.sumbarprov.go.id





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 23 Maret 2025

Plt. Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari tahun ketiga Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. LKjIP Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah sesuai dengan amanah Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhir kata, melalui penyampaian Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan tahun yang akan datang.

Padang, 25 Maret 2025



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,

Medi Iswandi, ST, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19750502 199903 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2024, Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah menunjukkan capaian outcome kinerja dengan hasil yang “Sangat Baik” dalam menjalankan kewenangan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan kredibel sesuai dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas terhadap Indeks Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dengan nilai sebesar 94,59 (Predikat Sangat Baik). Dalam pelaksanaan mewujudkan capaian outcome kinerja, Bappeda Provinsi Sumatera Barat mendapat dukungan SDM sejumlah 75 orang dan pagu anggaran sebesar Rp 20.054.954.042,-. Hingga 31 Desember 2024, realisasi pagu anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat mencapai sebesar Rp 18.931.696.909,- atau sebesar 94,40% dari total pagu anggaran dengan rata-rata capaian kinerja untuk 3 indikator sasaran strategis sebesar 107,53%.



Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	81	94,59	116,78	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	81,83	84,09	102,76	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	97,03	100	103,06	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2024					107,53	

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2024

- 1) Secara keseluruhan, capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2024 dapat dinyatakan “berhasil”, karena realisasi 3 indikator kinerja sasaran strategisnya mencapai 100% keatas. Secara rata-rata capaian indikator kinerja Sasaran Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 107,53% dengan realisasi anggaran sebesar 94,40%.

- 2) Capaian kinerja keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar Rp 18.931.696.909,- atau 94,40% dari total pagu anggaran sebesar Rp 20.054.954.042,- yang tersebar pada 3 (tiga) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan serapan sebesar 95,99%, berikutnya Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan serapan anggaran sebesar 91,79% dan terakhir Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan serapan anggaran sebesar 77,62%.



Faktor Penghambat/Kendala dalam Pencapaian Target

- 1) Masih terdapat sebanyak 2 Perangkat Daerah yang belum melaksanakan Forum Perangkat Daerah sebagaimana diamanahkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Guna mengatasi hal ini, kedepannya Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan mendorong dan memastikan Perangkat Daerah melakukan Forum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai Kalender Perencanaan yang sudah dibagikan kepada Perangkat Daerah.
- 2) Masih belum optimalnya partisipasi aktif pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan Konsultasi Publik dan Pelaksanaan Musrenbang. Partisipasi aktif pemangku kepentingan merupakan salah satu indikator pembentuk pada dimensi proses dalam pencapaian Indeks Kualitas Perencanaan.
- 3) Keselarasan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP masih belum maksimal.
- 4) Kesesuaian Isu Strategis dengan Kebutuhan Daerah masih belum maksimal
- 5) Konsistensi anggaran per program antara RKPD dengan RPJMD belum bisa dijaga, karena pada saat pelaksanaan verifikasi sesuai dengan tahapannya, tim verifikasi belum optimal mengawal fokus dan prioritas pada masing-masing OPD mitra serta Peraturan Gubernur tentang SAB dan SSH yang menjadi acuan dalam melakukan verifikasi belum terbit.
- 6) Minimnya informasi dari SKPD terutama dalam penyusunan faktor pendorong dan penghambat sebagai bahan Analisis data capaian kinerja pembangunan daerah.
- 7) Target IKU dan IKD banyak yang tidak tercapai disebabkan tidak tepatnya penempatan belanja pada sub kegiatan pendukung.



Upaya yang Telah dilakukan dalam Rangka Pencapaian Realisasi Kinerja

- 1) Mendorong dan memastikan Perangkat Daerah melakukan Forum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai Kalender Perencanaan dengan pelaksanaan pengendalian rumusan kebijakan oleh Bappeda yang mengkoordinir pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

- 2) Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dan dialog publik untuk menjaring permasalahan dan isu strategis daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- 3) Mengembangkan inovasi perencanaan, diantaranya :
 1. Sakato Plan (sakatoplan.sumbarprov.go.id), merupakan super Aplikasi yang menggabungkan 3 menu yang dibutuhkan dalam proses penyusunan perencanaan yakni menu perencanaan, menu data dan informasi serta menu monitoring dan evaluasi.
 2. Dashboard Pembangunan (dashboard.sumbarprov.go.id), yang merupakan platform monitoring kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 3. SIGMAD atau Sistem Informasi Nagari Madani (www.sigamad.sumbarprov.go.id), yang berfungsi menghimpun data profil 1.156 Nagari/Desa/Kelurahan yang ada di Sumatera Barat. Target dari aplikasi ini adalah para perantau minang yang mau berinvestasi ke kampung halaman.
 4. Sumbarpreneur (sumbarpreneur.sumbarprov.go.id), merupakan system informasi yang digunakan untuk pendaftaran kelompok sasaran melalui sistem informasi untuk mengikuti program pengembangan kewirausahaan daerah dalam rangka mencetak 100 ribu Millenial Entrepreneur, Woman Entrepreneur dan Pelaku Ekonomi Kreatif.
- 4) Menjaga keselarasan antara sasaran strategis dan program kegiatan sehingga seluruh anggaran digunakan secara efektif dalam pencapaian kinerja. Hal ini dilakukan melalui :
 1. Pelaksanaan Konsultasi Publik pada tanggal 28 Maret 2024 dan Musrenbang RKPD Tahun 2025 pada tanggal 18 April 2024 yang bertujuan untuk menjaga keselarasan program dan kegiatan pembangunan dengan sasaran dan prioritas pembangunan.
 2. Pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah pada tanggal 13 s.d 31 Mei 2024.
- 5) Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota
- 6) Melaksanakan verifikasi dan validasi data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan capaian Indikator Kinerja Program pada masing-masing urusan dalam rangka Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah setiap triwulan.
- 7) Melaksanakan Workshop Alternatif Pendanaan Pembangunan Daerah pada tanggal 15 November 2024.



Upaya untuk Mempertahankan dan Meningkatkan Kinerja di Tahun 2025

- 1) Mendorong dan memastikan Perangkat Daerah melakukan Forum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai Kalender Perencanaan dengan pelaksanaan

- pengendalian rumusan kebijakan oleh Bappeda yang mengkoordinir pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
- 2) Melakukan upaya perbaikan pada pelaksanaan Konsultasi Publik dan Musrenbang, diantaranya :
 1. Pelaksanaan Konsultasi Publik dan Musrenbang dilaksanakan per tema/prioritas pembangunan dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah dan non pemerintah.
 2. Menerima masukan tidak hanya saat pelaksanaan konsultasi publik namun juga online melalui digital platform.
 3. Melaksanakan FGD dengan Perguruan Tinggi dengan melibatkan jajaran perguruan tinggi termasuk mahasiswa serta FGD dengan tokoh-tokoh pembangunan Sumatera Barat.
 - 3) Mengoptimalkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Kemendagri dan/atau Bappenas agar Keselarasan dalam dokumen RPJMD dan RKPD dengan dokumen RPJMN dan RKP dapat mencapai nilai yang Maksimum.
 - 4) Memperkuat upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan dan penganggaran serta memastikan prioritas pembangunan daerah dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
 - 5) Mengoptimalkan tindak lanjut pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui optimalisasi evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah serta kualitas hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah.
 - 6) Mengoptimalkan pelaksanaan verifikasi dan analisis terhadap rencana kerja Perangkat Daerah dengan upaya mendorong tim verifikasi untuk hadir disetiap jadwal pembahasan, menelaah keselarasan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP, dan Menelaah Kesesuaian Isu Strategis dengan Kebutuhan Daerah.
 - 7) Melakukan evaluasi dan monitoring berkala melalui pertemuan agar dapat membuat rumusan mitigasi risiko yang ada pada sasaran strategis Perangkat Daerah.



Penghargaan Tahun 2024

1. Masuknya Sumatera Barat dalam 12 daerah terbaik pada Event Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas setiap tahunnya. PPD merupakan evaluasi kreatif yang mengikuti kondisi aktual yang dilakukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam memberikan motivasi sekaligus apresiasi kepada pemerintah daerah yang

menghasilkan perencanaan yang berkualitas, konsisten, komprehensif, dan terukur, serta dapat dilaksanakan.

2. Meraih Penghargaan Provinsi Terinovatif Terbaik 2 secara Nasional dan Terbaik 1 di Regional Sumatera untuk inovasi Dashborad Pembangunan (Inovasi Digital) pada Penganugerahan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	1
1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi	1
1.1.2 Tugas dan Fungsi.....	1
1.1.3 Struktur Organisasi	7
1.2.4 Sumber Daya Manusia	8
1.2 Aspek Organisasi	10
1.3 Permasalahan Utama (Strategic Issued)	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Tujuan dan Sasaran OPD	14
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	19
2.3 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	24
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024	25
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	26
3.3.1 Tujuan 1 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	26
3.3.2 Tujuan 2 : Meningkatkan Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	47
3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2024	68
3.5 Penghargaan Tahun 2024	76
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	78
4.2 Tindak Lanjut kedepan	79
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Esselon II Tahun 2024	
2. Penghargaan yang diterima Tahun 2024	
3. Matrik Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023	
4. Bukti Dukung Hasil Kinerja Tahun 2024	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	8
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	10
Tabel 2.1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	15
Tabel 2.2	Strategi dan arah Kebijakan Jangka Menengah Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2021	17
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	24
Tabel 3.2	Hasil pengukuran Capaian indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ...	25
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Kinerja IKU Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tahun 2024	27
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1	29
Tabel 3.5	Rangkuman Kertas Kerja Penilaian Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	30
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026	32
Tabel 3.7	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Perencanaan	40
Tabel 3.8	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2 pada Tahun 2024	47
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2024	48
Tabel 3.10	Nilai Komponen Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024	50
Tabel 3.11	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026	51
Tabel 3.12	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	57
Tabel 3.13	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Tahun 2024	59
Tabel 3.14	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026	60
Tabel 3.15	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi	65
Tabel 3.16	Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	69
Tabel 3.17	Anggaran dan Realisasi Per Sub Kegiatan Tahun 2024	71

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Grafik 1.2	Persentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	10
Grafik 3.1	Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021 s.d Tahun 2024	26
Grafik 3.2	Realisasi Indeks Kualitas Perencanaan Selama Tahun 2021 s.d Tahun 2024 ..	31
Grafik 3.3	Perbandingan Indeks Kualitas Perencanaan dengan Provinsi se-Indonesia Pada Tahun 2024	33
Grafik 3.4	Capaian Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Per Komponen Tahun 2024	49
Grafik 3.5	Realisasi Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Selama Tahun 2021 s.d Tahun 2024	50
Grafik 3.6	Perbandingan Nilai SAKIP Bappeda Prov. Sumbar dengan Kementerian PPN/Bappenas	52
Grafik 3.7	Realisasi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat Selama Tahun 2021 s.d Tahun 2024	60
Grafik 3.8	Perbandingan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada Bappeda Prov. Sumbar dengan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 s.d 2024	61
Grafik 3.9	Grafik 3.9 Perkembangan Realisasi Belanja dibandingkan Target Penyerapan Per Bulan Tahun 2024	68
Grafik 3.10	Grafik 3.10 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2023 ...	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat	7
Gambar 1.2	Pohon Kinerja Kinerja Bappeda	11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat atau disingkat dengan nama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana Bappeda Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

1.1.2 Tugas dan Fungsi

Tugas dan dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat diatur didalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Bappeda Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja sebagai berikut :

1. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan.
- 2) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan di internal Badan;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di internal Badan;
 - d. Penyelenggaraan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah internal Badan;
 - e. Penyelenggaraan pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan Dokumentasi internal Badan;
 - f. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Badan;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa di internal Badan;
 - h. pengelenggaraan koordinasi pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian kinerja capaian program dan kegiatan internal Badan; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

2. Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- 1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi;
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. penyelenggaraan pengumpulan dan analisa data informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;

- c. penyelenggaraan koordinasi dan integrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas Bidang;
- d. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. penyelenggaraan Pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD;
- f. penyelenggaraan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
- g. penyelenggaraan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan Daerah;
- h. penyelenggaraan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap rencana pembangunan Daerah;
- i. penyelenggaraan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi perencanaan pembangunan;
- j. penyelenggaraan penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
- k. penyelenggaraan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- 1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- c. penyelenggaraan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan DPRD;
 - d. penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - g. penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - h. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - i. penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - j. penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kabupaten/Kota di Sumatera Barat lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - k. penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - l. penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- 1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, industri, perdagangan, investasi, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pariwisata dan koperasi serta usaha kecil dan menengah;
 - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. penyelenggaraan koordinasi bahan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (Perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- c. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- f. penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- h. penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- i. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- j. penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- k. penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kabupaten/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- l. penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

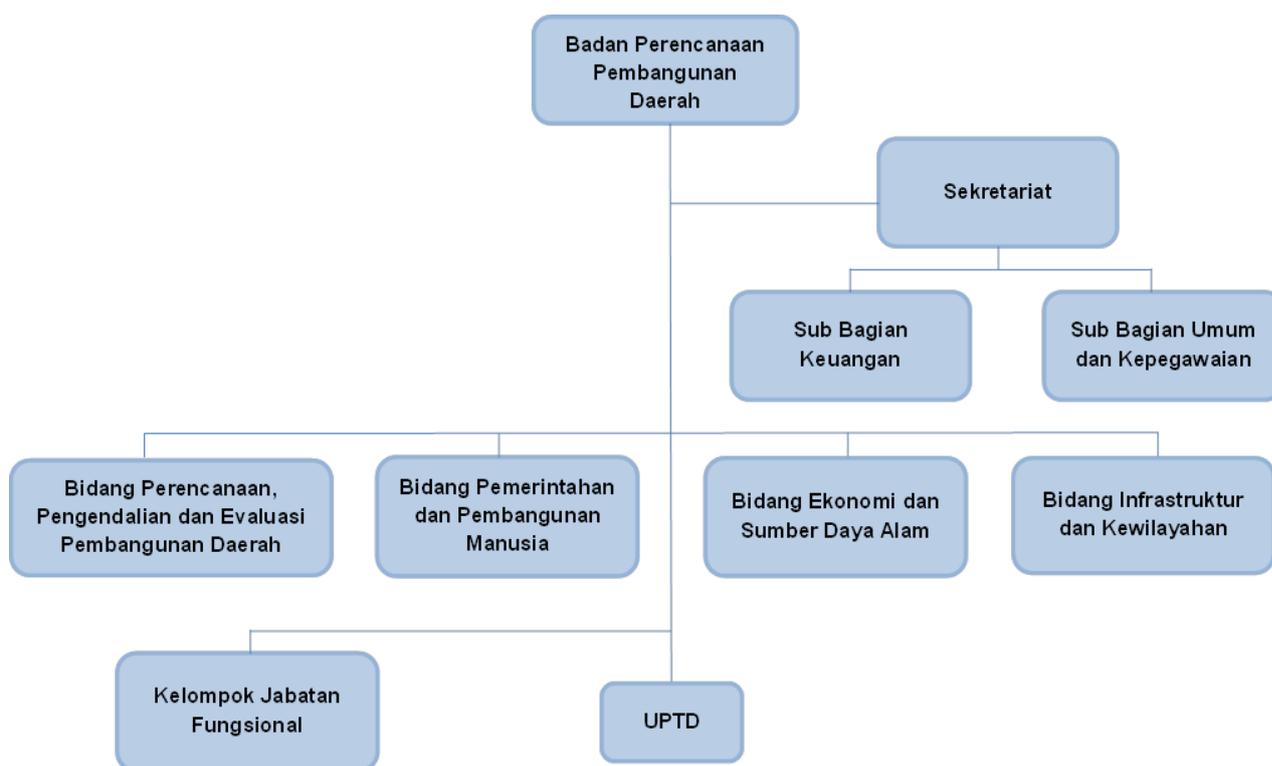
5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- 1) Bidang Infastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, Insfrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, Insfrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan dan Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Infastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - c. penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayaha;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. penyelenggaraan analisa dan mensinergikan perencanaan kewilayahan dengan mempedomani RTRW;
 - g. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - h. penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - i. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - j. penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - k. penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kabupaten/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - l. penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.1.3 Struktur Organisasi

Secara kelembagaan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah. Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan eselonering berada pada tingkat Eselon II Provinsi. Unsur pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat meliputi: 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 2 (dua) Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. dengan bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat
(Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023)



Sumber : Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023

1.1.4 Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan fungsi dan tugas pokok Bappeda Provinsi Sumatera Barat didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia sebanyak 75 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar di 4 bidang dan 1 kesekretariatan, dengan rincian sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

No	Uraian	Eselo n II	Eselo n III	Eselo n IV	Fung. Perencana	Fung. Umum	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	2	2	18	23
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	1	-	5	6	12
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	1	-	9	5	15
5.	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	-	1	-	5	6	12
6.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	1	-	5	6	12
	Total	1	5	2	26	41	75

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Sumbar

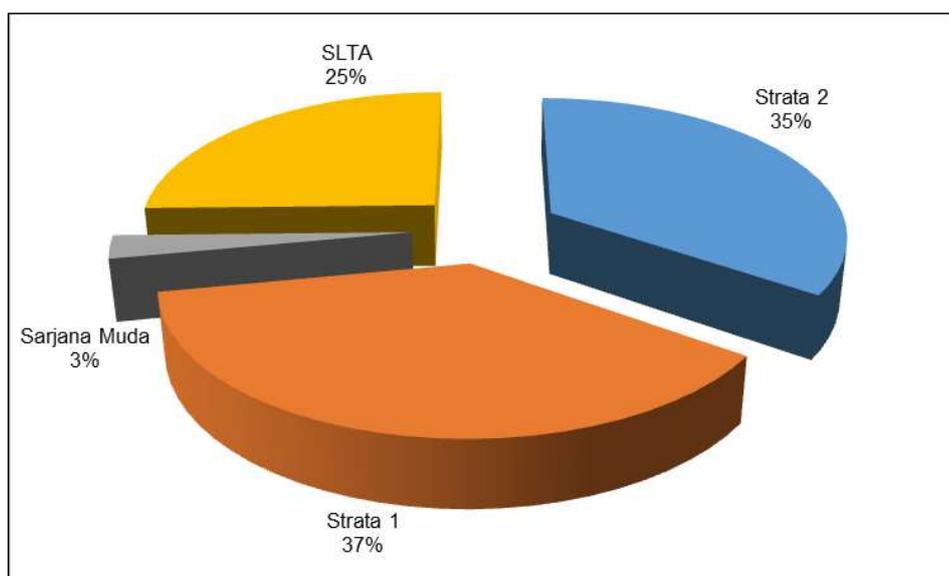
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai untuk jabatan Fungsional Perencana dibandingkan Fungsional Umum. Sebagaimana diketahui, sebagian besar tugas dan fungsi Bappeda dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan mengharuskan sebagian besar pegawainya adalah berstatus Fungsional Tertentu yaitu Fungsional Perencana.

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi ASN di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan Strata 1 yaitu sebanyak 28 orang atau sebesar 37%, strata 2 sebanyak 26 orang atau sebesar 35%, Sarjana Muda sebanyak 2 orang atau sebesar 3%, dan SLTA sebanyak 19 orang atau sebesar 25%. Gambaran secara lengkap dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Uraian	Strata 2	Strata 1	Sarjana Muda	SLTA	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	2	9	1	10	23
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5	4	-	3	12
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5	8	-	2	15
5.	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	7	3	1	1	12
6.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5	4	-	3	12
	Total	26	28	2	19	75

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Sumbar

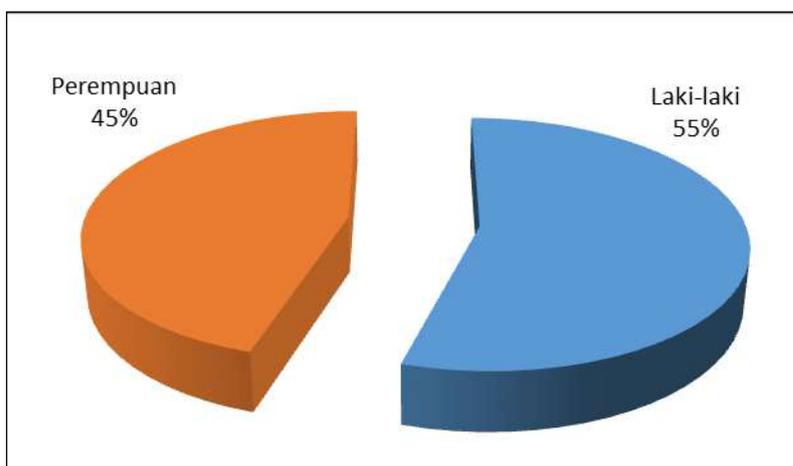
Grafik 1.1 Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat terbanyak adalah laki-laki yaitu sebanyak 41 orang atau sebesar 55% dan perempuan sebanyak 34 orang atau sebesar 45%. Secara lengkap komposisi pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	1	-	1
2.	Sekretariat	13	10	23
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6	6	12
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8	7	15
5.	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	6	6	12
6.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	7	5	12
	Total	41	34	75

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Sumbar

Grafik 1.2 Persentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Secara keseluruhan, dengan kondisi dan peta kekuatan SDM Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang ada saat ini, kinerja organisasi mampu dijalankan dengan baik sehingga capaian kinerja dapat tercapai. Namun demikian, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM diperlukan guna memenuhi standar beban kerja pegawai yang ideal dan mewujudkan talenta SDM yang berintegritas, visioner dan unggul.

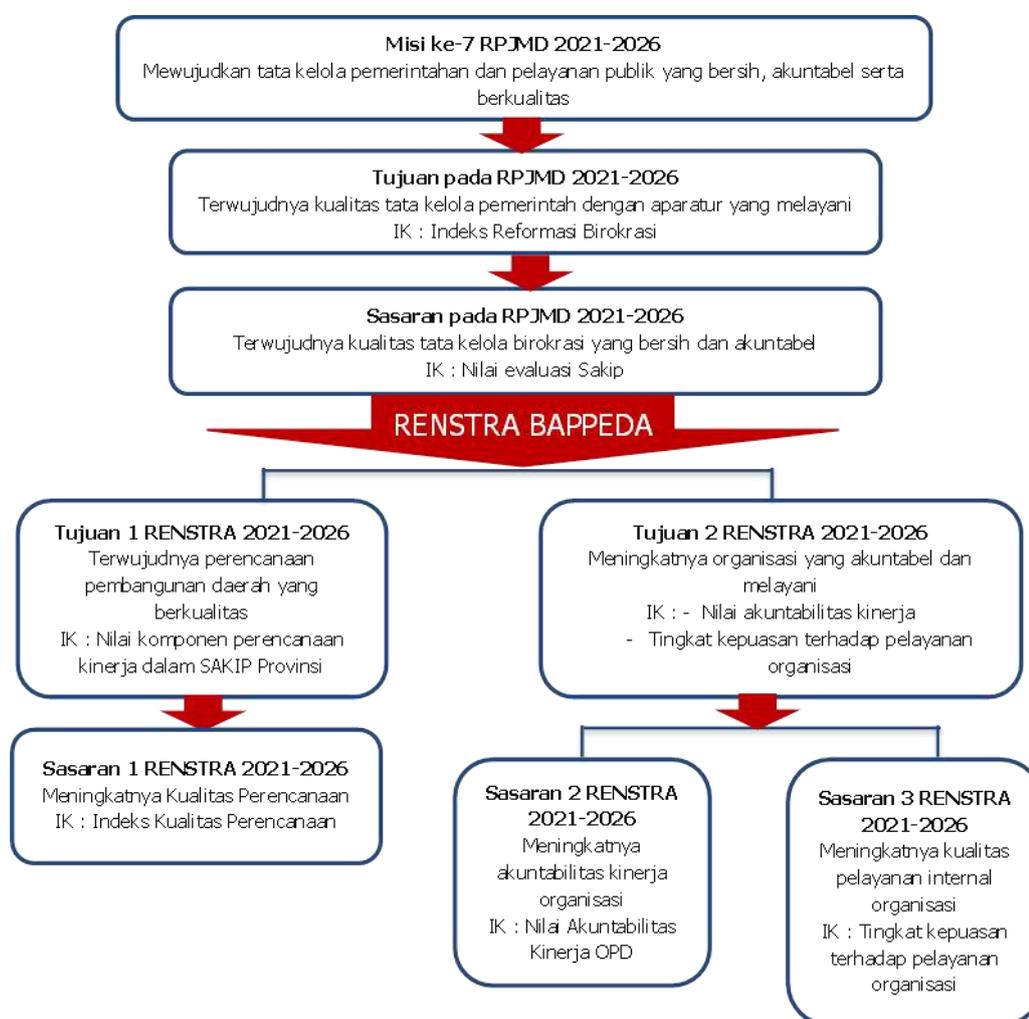
1.2 Aspek Strategis Organisasi

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Barat mendukung Misi ke-7 Kepala Daerah yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan skema kinerja yang digambarkan melalui Pohon Kinerja sebagai berikut :

Gambar 1.2. Pohon Kinerja Kinerja Bappeda

(Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026)



Sumber : Renstra Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Selanjutnya komitmen Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk menghadirkan kinerja institusi yang inklusif, transparan dan akuntabel, diharapkan dapat menularkan karakteristik serupa dalam pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat, seiring

dengan peran sentralnya dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam hal ini Bappeda Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi strategis, antara lain :

1. Menguatkan peran Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan yang memastikan : 1) proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas; 2) kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial; 3) Sinergitas dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan terjaga; dan 4) kualitas Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah berjalan maksimal.
2. Dalam konteks pengembangan informasi, Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga membangun sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*. Sistem informasi yang telah dibangun yaitu Sistem Informasi Perencanaan Sakato Plan.
3. Ketersediaan SDM Perencana yang cukup memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan rencana pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis dan kredibel.

1.3 Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi Organisasi

Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai badan pelaksana urusan perencanaan perlu melakukan akselerasi dan menyusun strategi terkait dengan kinerja aparaturnya, kedisiplinan serta ketaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga dapat menjawab tuntutan visi dan misi pembangunan daerah secara nyata dan profesional. Sebagaimana diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang baru terkait dengan implementasi Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan mengakibatkan Pemerintah Daerah dan Bappeda khususnya sebagai penyelenggara urusan penunjang perencanaan harus menyesuaikan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang baru untuk perencanaan berikutnya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Bappeda Provinsi Sumatera Barat masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain :

1. Proses Tahapan Perencanaan Belum Optimal :
 - a. Pengendalian terhadap tindak lanjut hasil pelaksanaan Musrenbang belum optimal.
 - b. Pengendalian terhadap pelaksanaan Forum OPD belum optimal.
2. Dokumen perencanaan pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah:
 - a. Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal.
 - b. Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum optimal didasarkan pada skala prioritas pembangunan.
 - c. Perumusan tolok ukur kinerja belum sepenuhnya mendukung capaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan.
 - d. Perencanaan dan penganggaran pada dokumen perencanaan belum sepenuhnya berdasarkan analisa kebutuhan.
3. Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal:
 - a. Evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan belum optimal.
 - b. Ketersediaan hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah belum optimal.
 - c. Dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah belum optimal.
 - d. Pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran OPD

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Hal ini sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan cascading kinerja, Bappeda Provinsi Sumatera Barat mendukung Misi ke-7 yaitu Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas dengan pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel. Terkait hal tersebut, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, yaitu :

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, dengan indikator tujuan yaitu Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Provinsi;
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan indikator tujuan yaitu a) Nilai Akuntabilitas Kinerja; dan b) Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Adapun sasaran yang dicapai Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi, dengan indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama periode Renstra 2021-2026 dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

MISI KE-7 RPJMD 2021-2026 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas												
TUJUAN RPJMD 2021-2026 : Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani												
SASARAN RPJMD 2021-2026: Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel												
Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat :												
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Penghitungan	Tahun Dasar	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Provinsi			Nilai komponen perencanaan kinerja (bobot penilaian 30%) diperoleh dari : a. rencana strategis (10%) meliputi : 1) pemenuhan renstra 2% 2) kualitas renstra 5%, 3) implementasi renstra 3%. b. perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi : 1) pemenuhan RKT 4%	25,20	25,60	25,84	26,07	26,38	26,62	26,87

					2) kualitas RKT 10% 3) implementasi RKT 6%.							
			Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan = Dimensi penilaian terhadap Proses 30% + Dimensi Isi Dokumen 40% + Dimensi Tindak Lanjut 30%	N.A	70	73	77	81	85	89
2.	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja				74,90	77,25	78,25	79,25	80,25	81,25	82,25
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD		74,90	77,25	78,25	79,25	80,25	81,25	82,25
		Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi				75,00	80,00	83,00	86,00	87,00	89,00	91,00
			Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Sangat baik : ≥ 91 Baik : 81-90 Sedang : 71-80 Buruk : < 70	75,00	80,00	83,00	86,00	87,00	89,00	91,00

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD setiap tahunnya yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda. Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan	Menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas	Mengoptimalkan Pelaksanaan Forum OPD, Konsultasi Publik serta Musrenbang
		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial	Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan
			Mengoptimalkan Penerapan Integrasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan dengan penajaman indikator sesuai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			bidang urusan
		Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah
			Penerapan Kerangka Belanja Kegiatan dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
			Pemanfaatan Data dan Informasi yang Valid, mudah di akses dan Mutakhir berbasis Satu Data
Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Meningkatkan kualitas perencanaan organisasi	Peningkatan SDM organisasi
		Meningkatkan kualitas pelaporan organisasi	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan organisasi
		Meningkatkan pengawasan	Peningkatan kualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		internal organisasi	pengendalian dan evaluasi pengawasan internal organisasi
	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Meningkatkan pelayanan umum organisasi	Peningkatan Kualitas Standar Operasional Prosedur yang dipedomani
		Meningkatnya pelayanan kepegawaian organisasi	Peningkatan kualitas data kepegawaian serta Anjab dan ABK yang dipedomani
		Meningkatnya penatausahaan dan pengelolaan BMD	Peningkatan pengelolaan BMD
		Meningkatkan pelayanan keuangan internal organisasi	Peningkatan penatausahaan dan pelaporan keuangan

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Salah satu tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dengan penerima amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian

keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 19 Januari 2024. Kinerja inilah yang selanjutnya dijabarkan (cascading) menjadi kinerja seluruh unit kerja dan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan ditandatangani tersebut tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	1.1 Indeks Kualitas Perencanaan	81
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	2.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	81,83
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	3.1 Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	97,03

No.	Program	Anggaran (Rp.)		Selisih	Ket.
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.608.011.852	17.180.377.559	(427.634.293)	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.277.451.200	1.403.991.200	126.540.000	APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.184.080.790	1.470.585.283	(713.495.507)	APBD
4.	Program Perencanaan	967.604.000	967.604.000	-	Dana

No.	Program	Anggaran (Rp.)		Selisih	Ket.
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Pembangunan Nasional				Dekonsentrasi
	Jumlah	22.037.147.842	20.049.735.634	(1.306.280.704)	

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Adapun formula penghitungan indikator kinerja sasaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Indeks Kualitas Perencanaan

Untuk tahun 2024, hasil pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Hal ini dilakukan berdasarkan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 bagi seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah dimana penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) menjadi salah satu komponen penilaian RB General K/L dan Pemerintah Provinsi sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, serta sehubungan dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian/Lembaga/Daerah (Pemerintah Provinsi), dengan formula sebagai berikut :

Indeks Perencanaan Pembangunan

= Jumlah skor aspek Integrasi + Sinkronisasi + Sinergi

No	Aspek	Bobot	Indikator	Bobot	Dokumen yang dinilai
1.	Sinergi	32	Keselarasn Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	9	RPJMN – RPJMD
			Keselarasn Dokumen RKPD dengan RKP	13	Modul PPD dan RKP–RKPD
			Kesesuaian Anggaran Daerah (APBD) untuk membiayai Program Prioritas Nasional dalam Dokumen RKPD	10	RKP – RKPD

No	Aspek	Bobot	Indikator	Bobot	Dokumen yang dinilai
2.	Kualitas Perencanaan	58	Kesesuaian antara Isu Strategis-Target-Program / Kegiatan di RPJMD atau RKPD	49	Modul PPD dan RPJMD / RKPD
			Inovasi Perencanaan Pembangunan	9	Modul PPD
3.	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	10	Target dan Sasaran Pembangunan Daerah Menjadi Target dan Sasaran Kinerja Lembaga Terkait	10	RKPD – Renstra / Renja OPD

2. Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Realisasi indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD diambilkan dari hasil evaluasi Inspektorat terhadap nilai SAKIP Bappeda Tahun n-1 yang dikeluarkan pada bulan Maret Tahun ke-n.

3. Indikator Kinerja Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

Realisasi indikator kinerja Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dihitung berdasarkan survei kepuasan yang dilakukan oleh tamu yang datang ke Bappeda. Dalam hal ini, Bappeda Provinsi Sumatera Barat menyediakan media survei layanan untuk survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Bappeda.

2.3 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan. Dalam hal ini Bappeda Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya terutama dalam meningkatkan kualitas dan capaian perencanaan pembangunan daerah.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Bappeda Provinsi Sumatera Barat membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*.

Sistem informasi yang telah dibangun untuk mendukung capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat antara lain :

1. Sistem Informasi Perencanaan (Sakato Plan).

Sakato Plan merupakan sistem informasi daerah yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari menu :

- Perencanaan
- Monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah
- Data dan informasi pembangunan daerah
- Aplikasi internal Bappeda, yang memuat layanan e-kendaraan dan ruangan, UMKM untuk makan dan minum rapat, kalender perencanaan, dan Penilaian Kinerja.

didalam pengelolaannya masing-masing menu saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya sehingga memudahkan dan meringkaskan input data yang tidak berulang. Sakato Plan dapat diakses dengan alamat <https://sakatoplan.sumbarprov.go.id>

2. Website Bappeda

Bappeda Provinsi Sumatera Barat mempunyai wadah informasi berupa website yang dapat diakses melalui www.bappeda.sumbarprov.go.id. Website ini memberikan informasi berupa dokumen-dokumen perencanaan, pelaporan dan pelaksanaan kegiatan di Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

3. Layanan Informasi Media Sosial

Selain memberikan informasi melalui website, Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga telah memiliki layanan informasi melalui kanal Youtube, Facebook dan Instagram.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat pada Tahun 2024. Berikut rekapitulasi realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 :

Tabel 3.2 Hasil pengukuran Capaian indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

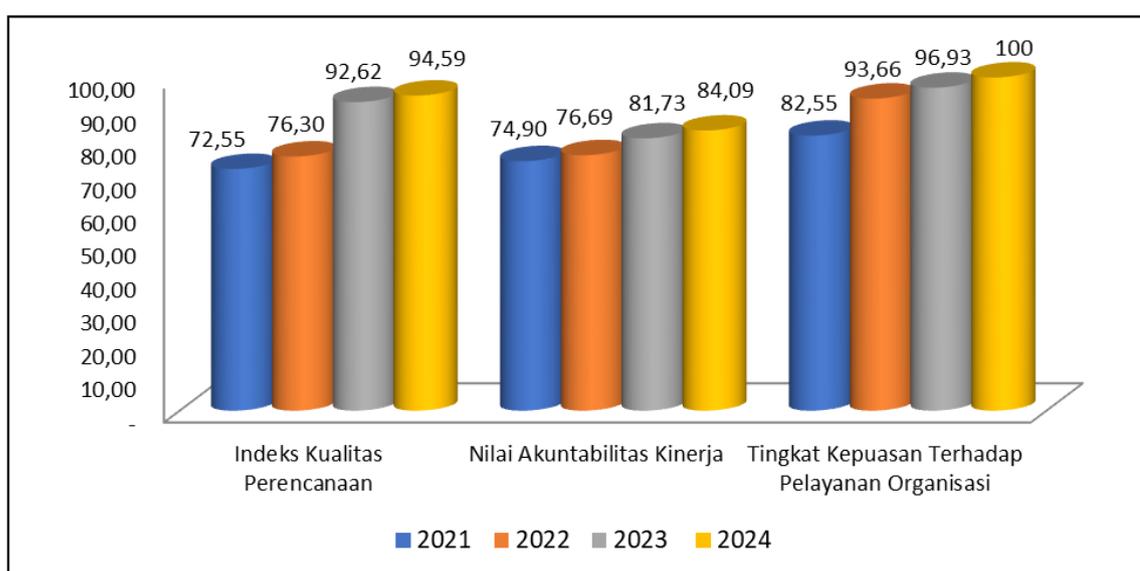
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas		Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dalam SAKIP Provinsi	26,38	26,09	98,90
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	81	94,59	116,78
2.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani		1. Nilai Akuntabilitas Kinerja.	81,83	84,09	102,76
			2. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	97,03	100	103,06
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	81,83	84,09	102,76
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	97,03	100	103,06
Jumlah Capaian 3 Indikator Kinerja Sasaran Bappeda						322,60
Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2024						107,53

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa 2 sasaran kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan 3 indikator kinerja sasaran strategis tercapai lebih dari 100%. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 107,53% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti bahwa upaya-upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh Bappeda dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 telah dilakukan dengan baik.

Berikut perbandingan hasil pengukuran realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 s.d 2024 sesuai dengan sasaran strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang tertuang didalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 :

Grafik 3.1 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021 s.d Tahun 2024



Sumber Data : Diolah dari data kinerja Bappeda Prov. Sumatera Barat

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Guna melihat realisasi dan capaian kinerja terkait dengan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada analisis berikut :

3.3.1 Tujuan 1 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, telah dirumuskan visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan yang didukung melalui 7 misi. Pada Misi ke 7 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas, yang memiliki tujuan terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur

yang melayani yang diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi, Kepala Daerah merumuskan 3 sasaran kinerja yang salah satunya yaitu terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel yang diukur dengan indikator kinerja Nilai evaluasi SAKIP. 30 % dari komponen nilai evaluasi SAKIP ini adalah Perencanaan Kinerja yang merupakan tugas dan tanggung jawab Bappeda. Berdasarkan hal inilah Bappeda Provinsi Sumatera Barat merumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator kerjanya dalam Renstra Tahun 2021-2026, dengan 2 tujuan dan 3 sasaran.

Pada tujuan pertama ini, yaitu Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dengan indikator kinerja Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dalam SAKIP Provinsi, pada tahun 2024 dengan target sebesar 26,38 terealisasi sebesar 26,09 atau sebesar 98,90%.

Sumber data indikator kinerja tujuan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dalam SAKIP Provinsi didapat melalui hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap SAKIP Provinsi dengan hasil penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja IKU Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tahun 2024

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	26,13	26,09
2	Pengukuran Kinerja	30	21,40	21,95
3	Pelaporan Kinerja	15	12,76	12,81
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,05	18,13
	Nilai Hasil Evaluasi	100	78,34	78,98

Sumber Data : Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Tahun 2024

Realisasi tujuan 1 sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 yaitu turun sebesar 0,04. Berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat catatan terkait Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja beberapa Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Barat yang belum sepenuhnya mempertimbangkan logical framework dan Critical Success Factor (CSF) yang harus menjadi perhatian didalam penyusunan perencanaan kinerja. Target kinerja tujuan pertama ini direalisasikan dengan 1 sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan. Berikut analisis capaian sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Perencanaan pada Tahun 2024.



SASARAN 1

Meningkatkan Kualitas Perencanaan

Dalam rangka mendukung terwujudnya misi Kepala Daerah yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terutama misi ke-7 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas yang dijabarkan pada 3 sasaran yang salah satunya adalah sasaran Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan Akuntabel, Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dengan indikator Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dalam SAKIP Provinsi. Tujuan ini dicapai melalui penetapan sasaran kinerja Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang keberhasilannya diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kualitas Perencanaan.

Indeks Kualitas Perencanaan adalah angka yang didapatkan dari penilaian terhadap proses perencanaan, substansi dokumen perencanaan dan tindak lanjut terhadap perencanaan yang ditetapkan melalui penghitungan secara pembobotan terhadap dimensi pembentuknya yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas RI.

Kegunaan dari indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan ini adalah untuk mengukur dan mengetahui kualitas perencanaan baik dari sisi proses perencanaan, isi dokumen perencanaan, dan tindak lanjut perencanaan yang disusun pada tahun berkenaan.

Dokumen Perencanaan yang dihasilkan pada Tahun 2024 :



**RPJPD Prov. Sumbar
Tahun 2025-2045**



**RKPD Prov. Sumbar
Tahun 2025**



**Perubahan RKPD Prov.
Sumbar Tahun 2024**

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024. Sebagaimana tertuang didalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan dengan indikator Indeks Kualitas Perencanaan pada tahun 2024 ditetapkan dengan target sebesar 81 dan terealisasi pada tahun 2024 sebesar 94,59 atau berhasil tercapai sebesar 116,78% dari target yang ditetapkan.

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kriteria
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	81	94,59	116,78	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja					116,78	

Sumber : Dokumen Hasil Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Provinsi Tahun 2024

Hasil pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan tahun 2024 merujuk pada hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Hal ini dilakukan berdasarkan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 bagi seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah dimana penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) menjadi salah satu komponen penilaian RB General K/L dan Pemerintah Provinsi sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, serta sehubungan dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian/Lembaga/Daerah (Pemerintah Provinsi). Tujuan dari penilaian IPPN ini adalah untuk memastikan kualitas perencanaan yang telah disusun oleh seluruh instansi pemerintah berbasis dampak (outcome) untuk memastikan kebermanfaatannya terhadap masyarakat serta seluruh pihak terkait.

Terdapat beberapa aspek penilaian yang dijadikan sebagai dasar untuk mengukur kualitas hasil perencanaan dalam IPPN Pemerintah Provinsi tersebut, yang meliputi 1) Aspek Sinergi, 2) Aspek Kualitas Perencanaan, dan 3) Aspek Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja. Tabel berikut menjelaskan terkait aspek dan indikator yang dinilai pada Pemerintah Provinsi, bobot penilaian, dokumen yang dinilai serta rata-rata keselarasan terbobot berdasarkan kertas kerja penilaian.

Tabel 3.5 Rangkuman Kertas Kerja Penilaian Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Aspek	Bobot	Indikator	Bobot	Dokumen yang dinilai	Hasil Penilaian
1.	Sinergi	32	Keselarasn Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	9	RPJMN – RPJMD	8,18
			Keselarasn Dokumen RKPD dengan RKP	13	Modul PPD dan RKP – RKPD	11,57
			Kesesuaian Anggaran Daerah (APBD) untuk membiayai Program Prioritas Nasional dalam Dokumen RKPD	10	RKP – RKPD	10
2.	Kualitas Perencanaan	58	Kesesuaian antara Isu Strategis-Target-Program / Kegiatan di RPJMD atau RKPD	49	Modul PPD dan RPJMD / RKPD	46,68
			Inovasi Perencanaan Pembangunan	9	Modul PPD	8,16
3.	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	10	Target dan Sasaran Pembangunan Daerah Menjadi Target dan Sasaran Kinerja Lembaga Terkait	10	RKPD – Renstra / Renja OPD	10
Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan						94,59

Sumber : Dokumen Hasil Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Provinsi Tahun 2024

Berdasarkan hasil nilai yang telah didapatkan pada tiap aspek sebagaimana tergambar pada tabel 3.5 diatas, pada Dokumen Hasil Penilaian Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, selanjutnya akan diberikan poin-poin rekomendasi sebagai pedoman terkait tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah pada periode berikutnya. Secara umum, poin-poin rekomendasi yang diberikan untuk peningkatan kualitas

perencanaan pembangunan daerah tersebut secara detail kami lampirkan pada laporan kinerja ini berikut dengan hasil penilaian lengkap dari Kementerian PPN/Bappenas.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sebagaimana tergambar pada grafik berikut:

**Grafik 3.2 Realisasi Indeks Kualitas Perencanaan
Selama Tahun 2021 s.d Tahun 2024**



Sumber Data : diolah dari data kinerja Bappeda Prov. Sumatera Barat

Secara umum, Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah berupaya maksimal mencapai target kinerja Indeks Kualitas Perencanaan di tahun 2021 hingga tahun 2024. Hal ini terlihat dari progress realisasi setiap tahunnya, dimana realisasi Indeks Kualitas Perencanaan pada tahun 2021 sebesar 72,55 menjadi 94,59 pada tahun 2024. Capaian ini tidak terlepas dari setiap upaya perbaikan yang dilakukan terhadap setiap tahapan perencanaan yang dilakukan, mulai dari tahap proses perencanaan, menjaga sinergitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan hingga mengevaluasi tindak lanjut terhadap pelaksanaan perencanaan agar bisa memberikan kebermanfaatn terhadap masyarakat serta seluruh pihak terkait dalam pembangunan di Sumatera Barat.

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Dokumen RPJMD dan Dokumen Renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, bahwa sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan dengan indikator

kinerja Indeks Kualitas Perencanaan adalah mendukung tercapainya sasaran Kepala Daerah Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator kinerja Nilai evaluasi SAKIP sesuai yang dimuat dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dimaksud. Secara lengkap gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas perencanaan dibandingkan dengan target Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Target pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026

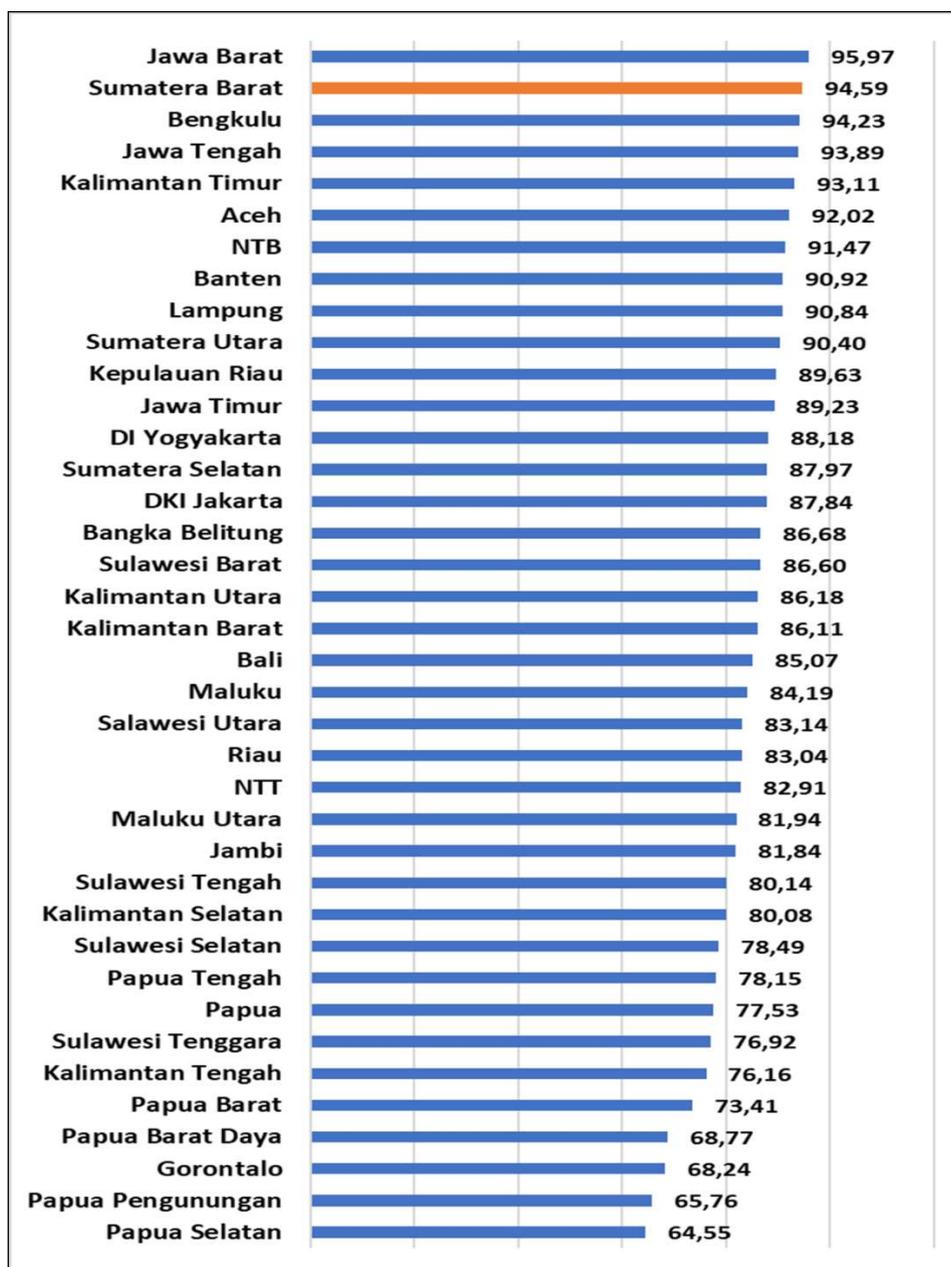
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD /Renstra	Capaian s.d Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD /Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	81	95,49	116,78	89	107,29
Rata-rata Capaian Kinerja					116,78		

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2024

Capaian Indeks Kualitas Perencanaan tahun 2024 telah melebihi target akhir pada Renstra/RPJMD dengan capaian sebesar 107,29%. Hal ini berarti bahwa kualitas perencanaan semakin membaik sehingga sasaran Kepala Daerah Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator kinerja Nilai evaluasi SAKIP dengan kontribusi 30% Perencanaan Kinerja yang merupakan tugas dan tanggung jawab Bappeda akan dapat tercapai.

Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional. Indeks Kualitas Perencanaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas berada pada urutan ke-2 terbaik dari 38 Provinsi di Indonesia. Provinsi Jawa Barat berada pada urutan pertama dengan Nilai Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan sebesar 95,97. Perbandingan nilai Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Provinsi se-Indonesia pada tahun 2024 tergambar pada grafik berikut :

Grafik 3.3 Perbandingan Indeks Kualitas Perencanaan dengan Provinsi se-Indonesia Pada Tahun 2024



Sumber : Dokumen Hasil Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Provinsi Tahun 2024

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah dilakukan. Untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan daerah, terdapat beberapa **faktor yang**

mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui upaya-upaya yang telah dilakukan selama tahun 2024 sebagai berikut :

1. Mendorong dan memastikan Perangkat Daerah melakukan Forum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai Kalender Perencanaan dengan pelaksanaan pengendalian rumusan kebijakan oleh Bappeda yang mengkoordinir pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
2. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dan dialog publik untuk menjaring permasalahan dan isu strategis daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan.
3. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Kewilayahan bersama Bappeda Kabupaten/Kota untuk menganalisis pencapaian indikator makro pembangunan daerah, perumusan permasalahan, isu strategis daerah dan perumusan rekomendasi arah kebijakan dan intervensi kewilayahan.
4. Melaksanakan penyusunan pedoman Perencanaan Pembangunan Partisipatif untuk Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif sebagai acuan untuk pelaksanaan proses perencanaan pembangunan yang melibatkan lembaga/organisasi/komunitas (Non Pemerintah)
5. Mengembangkan inovasi perencanaan, diantaranya :
 - Sakato Plan (sakatoplan.sumbarprov.go.id), merupakan super Aplikasi yang menggabungkan 3 menu yang dibutuhkan dalam proses penyusunan perencanaan yakni menu perencanaan, menu data dan informasi serta menu monitoring dan evaluasi.
 - Dashboard Pembangunan (dashboard.sumbarprov.go.id), yang merupakan platform monitoring kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - SIGMAD atau Sistem Informasi Nagari Madani (www.sigamad.sumbarprov.go.id), yang berfungsi menghimpun data profil 1.156 Nagari/Desa/Kelurahan yang ada di Sumatera Barat. Target dari aplikasi ini adalah para perantau minang yang mau berinvestasi ke kampung halaman.
 - Sumbarpreneur (sumbarpreneur.sumbarprov.go.id), merupakan system informasi yang digunakan untuk pendaftaran kelompok sasaran melalui sistem informasi untuk mengikuti program pengembangan kewirausahaan daerah dalam rangka mencetak 100 ribu Millenial Entrepreneur, Woman Entrepreneur dan Pelaku Ekonomi Kreatif.

6. Menjaga keselarasan antara sasaran strategis dan program kegiatan sehingga seluruh anggaran digunakan secara efektif dalam pencapaian kinerja. Hal ini dilakukan melalui :
 - a. Pelaksanaan Konsultasi Publik pada tanggal 28 Maret 2024 dan Musrenbang RKPD Tahun 2025 pada tanggal 18 April 2024 yang bertujuan untuk menjaga keselarasan program dan kegiatan pembangunan dengan sasaran dan prioritas pembangunan.
 - b. Pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah pada tanggal 13 s.d 31 Mei 2024.
7. Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota.
8. Melaksanakan verifikasi dan validasi data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan capaian Indikator Kinerja Program pada masing-masing urusan dalam rangka Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah setiap triwulan .
9. Melaksanakan Workshop Alternatif Pendanaan Pembangunan Daerah pada tanggal 15 November 2024.

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan kinerja Indeks Kualitas Perencanaan pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2024, juga terdapat beberapa **faktor yang menghambat** tercapainya sasaran kinerja ini yang dapat dilihat pada setiap dimensi perencanaan, diantaranya :

1. Masih terdapat sebanyak 2 Perangkat Daerah yang belum melaksanakan Forum Perangkat Daerah sebagaimana diamanahkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Guna mengatasi hal ini, kedepannya Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan mendorong dan memastikan Perangkat Daerah melakukan Forum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai Kalender Perencanaan yang sudah dibagikan kepada Perangkat Daerah.
2. Masih belum optimalnya partisipasi aktif pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan Konsultasi Publik dan Pelaksanaan Musrenbang.
3. Keselarasan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP masih belum maksimal.
4. Kesesuaian Isu Strategis dengan Kebutuhan Daerah masih belum maksimal.
5. Konsistensi anggaran per program antara RKPD dengan RPJMD belum bisa dijaga, karena pada saat pelaksanaan verifikasi sesuai dengan tahapannya, tim verifikasi belum optimal mengawal fokus dan prioritas pada masing-masing OPD mitra serta Peraturan Gubernur tentang SAB dan SSH yang menjadi acuan dalam melakukan verifikasi belum terbit.

6. Minimnya informasi dari SKPD terutama dalam penyusunan faktor pendorong dan penghambat sebagai bahan Analisis data capaian kinerja pembangunan daerah.
7. Target IKU dan IKD banyak yang tidak tercapai disebabkan tidak tepatnya penempatan belanja pada sub kegiatan pendukung.

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di tahun 2025, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa rencana aksi perbaikan dan alternatif tindak lanjut, seperti :

1. Pada tahapan proses perencanaan
 - a. Mendorong dan memastikan Perangkat Daerah melakukan Forum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai Kalender Perencanaan dengan pelaksanaan pengendalian rumusan kebijakan oleh Bappeda yang mengkoordinir pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
 - b. Melakukan dialog publik untuk menyampaikan isu-isu permasalahan pembangunan dan penyusunan kebijakan dengan memaksimalkan pemanfaatan media sosial Bappeda.
 - c. Melakukan upaya perbaikan pada pelaksanaan Konsultasi Publik dan Musrenbang, diantaranya :
 - Pelaksanaan Konsultasi Publik dan Musrenbang dilaksanakan per tema/prioritas pembangunan dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah dan non pemerintah.
 - Menerima masukan tidak hanya saat pelaksanaan konsultasi publik namun juga online melalui digital platform.
 - Melaksanakan FGD dengan Perguruan Tinggi dengan melibatkan jajaran perguruan tinggi termasuk mahasiswa serta FGD dengan tokoh-tokoh pembangunan Sumatera Barat.
2. Pada tahapan penyusunan dokumen perencanaan
 - a. Mengoptimalkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Kemendagri dan/atau Bappenas agar Keselarasan dalam dokumen RPJMD dan RKPD dengan dokumen RPJMN dan RKP dapat mencapai nilai yang Maksimum.
 - b. Memperkuat upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan dan penganggaran serta memastikan prioritas pembangunan daerah dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
 - c. Mengoptimalkan pelaksanaan verifikasi dan analisis terhadap rencana kerja Perangkat Daerah dengan upaya :
 - Mendorong tim verifikasi untuk hadir disetiap jadwal pembahasan.

- Menelaah keselarasan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP.
 - Menelaah Kesesuaian Isu Strategis dengan Kebutuhan Daerah.
- d. Menyusun dan menetapkan pembagian tugas kerja pada masing-masing personel serta membentuk pokja per bidang dalam penyusunan RKPD.
3. Pada Tahapan Tindak Lanjut Perencanaan
- a. Mengoptimalkan tindak lanjut pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui optimalisasi evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah serta kualitas hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Melakukan evaluasi dan monitoring berkala melalui pertemuan agar dapat membuat rumusan mitigasi risiko yang ada pada sasaran strategis Perangkat Daerah.
 - c. Melaksanakan pengendalian dan monitoring untuk memastikan Perangkat Daerah menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil evaluasi.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Perencanaan dengan Indikator Kinerja Indeks Kualitas Perencanaan, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten

Dalam mencapai target kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat didukung oleh ketersediaan Fungsional Perencana yang saat ini berjumlah 26 orang yang tersebar di empat bidang dan Sekretariat serta 4 orang calon Fungsional Perencanaan yang telah lulus Uji Kompetensi dari Kementerian PPN/Bappenas. Fungsional Perencana inilah yang melakukan analisis dan menyusun dokumen perencanaan daerah serta melakukan evaluasi atas pencapaian target kinerja pembangunan daerah.

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut
Jumlah Fungsional Perencana yang dibutuhkan sesuai usulan peta jabatan 58 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Fungsional Perencana yang ada, 26 orang. - Calon Fungsional Perencana yang telah lulus uji kompetensi, 4 orang 	Untuk memenuhi kebutuhan Fungsional Perencana, maka ASN Pelaksana akan diikutkan dalam uji kompetensi JFP yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas

2. Sarana dan Prasarana yang memadai
Ketersediaan Aplikasi Sakato Plan yang merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan dokumen perencanaan, mengawal proses perencanaan, serta merespon aspirasi masyarakat luas. Sakato Plan dapat diakses melalui [sakatoplan.sumbarprov.go.id /sakatoplan](http://sakatoplan.sumbarprov.go.id/sakatoplan).
3. Ketersediaan Anggaran yang efektif
Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan dengan target 81 pada tahun 2024 yang tercapai sebesar 94,59 dengan tingkat capaian sebesar 116,78%, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 2.874.576.483,- dengan realisasi sebesar Rp 2.439.679.407,- atau sebesar 84,87%. Anggaran ini tersebar pada 2 (dua) Program yaitu 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 1.403.991.200,- yang terdiri atas 3 kegiatan dengan 7 sub kegiatan, dan 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 1.470.585.283,- yang terdiri atas 3 kegiatan dengan 27 sub kegiatan.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 2.874.576.483,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 116,78%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 2.439.679.407,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(Rp\ 2.874.576.483 \times 116,78\%) - Rp\ 2.439.679.407}{(Rp\ 2.874.576.483)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{Rp\ 3.356.930.416,85 - Rp\ 2.436.679.407}{Rp\ 2.874.576.483} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 0,32$$

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (\text{Efisiensi Kinerja}/20) * 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (0,32 / 20)*50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 129,77\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 129,77% (sesuai dengan ketentuan bahwa untuk yang Nilai efesiensinya tercapai >100% maka nilai efesiensinya dibulatkan 100%) dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan dengan capaian indikator kinerja sebesar 116,78%%. Efisiensi terutama dilakukan dalam penghematan perjalanan dinas, pelaksanaan rapat koordinasi tidak menggunakan hotel tapi dilaksanakan di kantor Bappeda, serta penghematan belanja penunjang seperti ATK, cetak dan penggandaan.

Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan :

**Tabel 3.7 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024
Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Perencanaan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan, target 81 dan realisasi 94,59 dengan capaian sebesar 116,78%						2.874.576.483	2.439.679.407	84,87
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	90%	90,43%	1.403.991.200	1.089.761.087	77,62
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	3 dokumen	3 dokumen	1.044.603.300	847.664.000	81,15
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.596.500	50.581.250	99,97
				Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	1 Berita Acara	255.901.100	255.781.100	99,95
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 dokumen	738.105.700	541.301.650	73,34

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 dokumen	4 dokumen	145.587.900	98.571.137	67,71
				Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	57.408.500	46.535.500	81,06
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	38 Orang	38 Orang	88.179.400	52.035.637	59,01
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	90%	90,43%	213.800.000	143.525.950	67,13
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	81.376.500	12.381.500	15,22
				Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	38 Dokumen	38 dokumen	132.423.500	131.144.450	99,03

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	70%	82,15%	1.470.585.283	1.349.918.320	91,79
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 Rancangan Dokumen	3 Rancangan Dokumen	624.579.100	583.414.470	93,41
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 dokumen	95.818.200	87.213.700	91,02
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	3 laporan	38.183.800	37.362.300	97,85
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	67.996.300	67.125.600	98,72
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	21.723.100	21.693.100	99,86

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 dokumen	91.233.100	81.974.100	89,85
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	3 laporan	31.277.700	31.275.200	99,99
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	85.670.400	77.399.970	90,35
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	192.676.500	179.370.500	93,09
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3 Rancangan Dokumen	3 Rancangan Dokumen	503.304.433	448.445.050	89,10
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 dokumen	60.419.250	60.350.200	99,89

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 laporan	31.572.900	31.567.200	99,98
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	117.581.900	110.832.050	94,26
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	61.315.300	37.263.000	60,77
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 dokumen	38.470.000	38.426.000	99,89
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3 laporan	28.720.000	28.716.000	99,99
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	110.087.483	103.846.000	94,33

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	55.137.600	37.444.600	67,91
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Wilayah	3 Rancangan Dokumen	3 Rancangan Dokumen	342.701.750	318.058.800	92,81
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 dokumen	59.174.000	58.390.100	98,68
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 laporan	36.357.300	36.103.800	99,30
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	42.577.800	40.165.950	94,34
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	28.047.300	26.477.000	94,40

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 dokumen	22.428.900	22.421.900	99,97
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	34.378.350	33.735.450	98,13
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	119.738.100	100.764.600	84,15

Sumber Data : Realisasi Rencana Aksi Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, data diolah

3.3.2 Tujuan 2 : Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani

Tujuan ke-2 Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani diukur melalui 2 indikator kinerja tujuan yaitu 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja dan 2)Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi. Pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja pada Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.8 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2 pada Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	81,83	84,09	102,76	82,25	102,24
		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	97,03	100	103,06	91	109,89
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan 2					102,91		

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2024

Dilihat dari realisasi indikator kinerja tujuan diatas dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan kedua telah dicapai dengan baik, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 102,91%. Jika dilihat pada target akhir Renstra, realisasi tujuan ini telah melebihi target Renstra/RPJMD, dimana capaian tahun 2024 terhadap target akhir Renstra untuk masing-masing indikator tujuan telah lebih dari 100%. Walaupun telah melebihi target akhir Rentsra/RPJMD, Bappeda Provinsi Sumatera Barat terus meningkatkan kinerja organisasi dalam mewujudkan tercapainya Reformasi Birokrasi yang berdampak terutama dilingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Ketercapaian target kinerja tujuan kedua ini direalisasikan dengan 2 sasaran strategis yaitu 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan; 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi. Berikut analisis capaian sasaran kinerja pada Tahun 2024.



SASARAN 2.1

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, sebagaimana amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hal tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi sebagai alat ukur dalam peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024. Pengukuran pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dilakukan melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD. Sebagaimana tertuang didalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD pada tahun 2024 ditetapkan dengan target sebesar 81,83.

Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/19/LHE/INSP/2024 tanggal 20 Juni 2024, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai akuntabilitas kinerja 84,09% dengan kategori A dari target sebesar 81,83% atau dengan capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 102,76%. Nilai ini menunjukkan bahwa AKIP Bappeda Provinsi Sumatera Barat sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja handal.

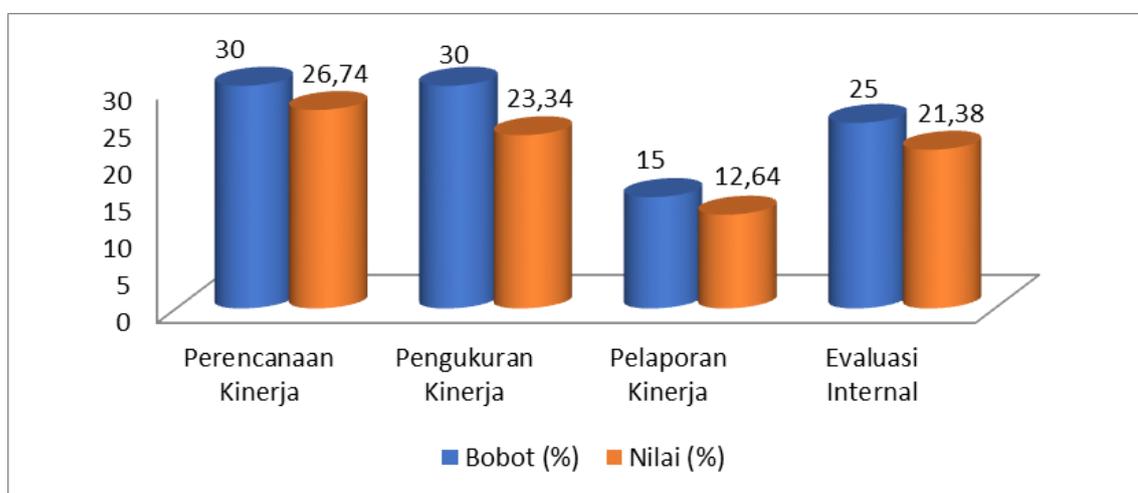
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kriteria
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	81,83	84,09	102,76	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja					102,76	

Sumber : Hasil LHE Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Nilai Akuntabilitas Kinerja diukur dengan formula penghitungan penjumlahan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja yaitu Nilai Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inpektorat Provinsi Sumatera Barat terhadap 4 (empat) komponen tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai tertinggi pada komponen Pelaporan Kinerja dengan nilai 12,64% dari bobot 15% dan komponen terendah adalah Pengukuran Kinerja dengan nilai 23,34% dari bobot 30%. Berikut rincian komponen nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun Penilaian 2024 :

Grafik 3.4 Capaian Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Per Komponen Tahun 2024

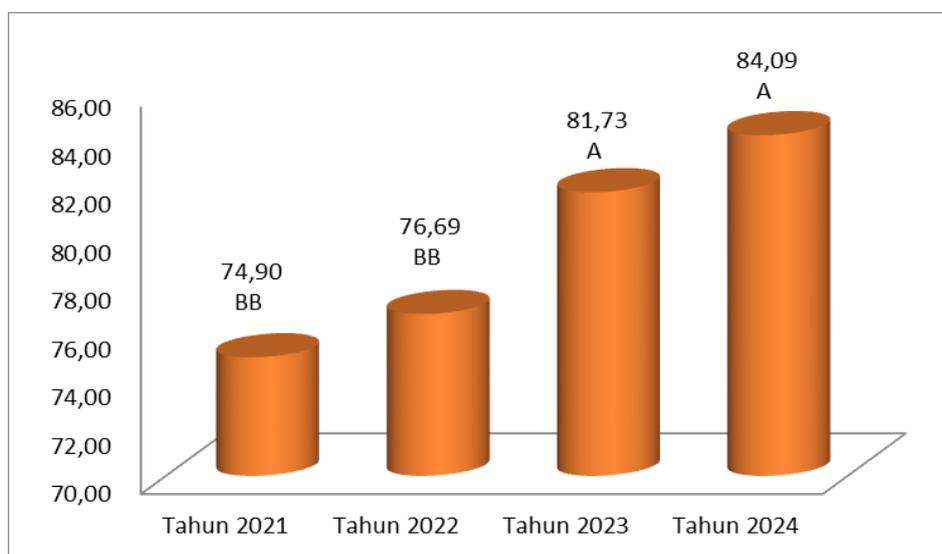


Sumber : Hasil LHE Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa rekomendasi untuk perbaikan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun ini meningkat dari nilai 81,73 menjadi 84,09 atau meningkat 2,36 point. Perkembangan nilai akuntabilitas kinerja pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.5 Realisasi Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Selama Tahun 2021 s.d Tahun 2024



Sumber : Hasil LHE Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Meskipun secara keseluruhan nilai SAKIP Bappeda Provinsi Sumatera Barat meningkat dari tahun ke tahun, namun jika dilihat dari seluruh komponen, terjadi penurunan nilai dari komponen Perencanaan Kinerja yaitu dari 27,04 pada tahun 2023 menjadi 26,74 pada tahun 2024 dimana turun sebesar 0,3 point dan komponen Evaluasi Internal yaitu dari 22,25 pada tahun 2023 menjadi 21,38 pada tahun 2024 dimana turun sebesar 0,87 point. Dalam hal ini, untuk perencanaan kinerja dan evaluasi internal tahun 2024 Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan catatan rekomendasi hasil evaluasi oleh Inspektorat. Berikut secara detail dapat dilihat perbandingan nilai hasil evaluasi per komponen tahun 2021-2024.

Tabel 3.10 Nilai Komponen Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024

No	Aspek Komponen Penilaian	Nilai			
		2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	25,93	27,05	27,04	26,74
2	Pengukuran Kinerja	19,17	19,79	20,93	23,34
3	Pelaporan Kinerja	10,88	12,41	11,51	12,64
4	Evaluasi Internal	6,19	6,19	22,25	21,38
5	Pencapaian Kinerja	12,75	11,25		
Nilai Hasil Evaluasi		74,90	76,69	81,73	84,09
Kategori		BB	BB	A	A

Sumber : Hasil LHE Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Perbandingan Realisasi dengan Dokumen Renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, bahwa Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi melalui indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.

Tabel 3.11 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026

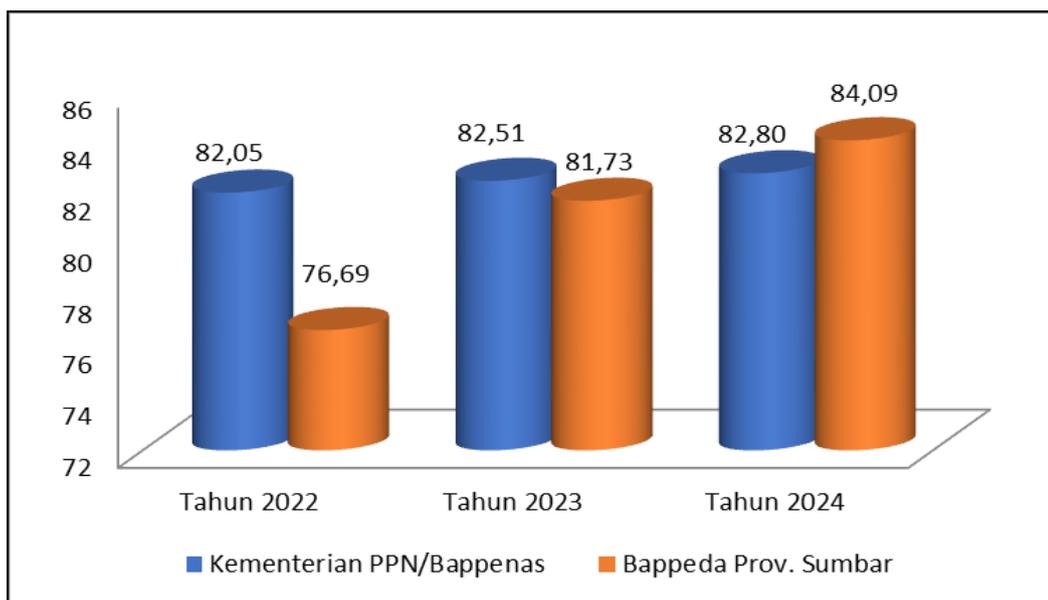
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD /Renstra	Capaian s.d Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD /Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	81,83	84,09	102,76	82,25	102,24
Rata-rata Capaian Kinerja					102,76		

Sumber : Hasil LHE Inspektorat dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 3.11 diatas dapat dilihat bahwa capaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD telah melebihi target Renstra/RPJMD, dimana target akhir pada Renstra adalah sebesar 82,25. Hal ini berarti, bahwa seluruh ASN Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja dalam mewujudkan terlaksananya Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional. Jika dibandingkan dengan nilai SAKIP Kementerian PPN/Bappenas, nilai SAKIP Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 lebih tinggi 1,29 point dari nilai SAKIP Kementerian PPN Bappenas, dimana nilai SAKIP Kementerian PPN Bappenas Tahun 2024 adalah sebesar 82,80. Perbandingan nilai SAKIP berturut-turut sejak tahun 2022 sampai dengan 2024 tergambar pada grafik berikut :

Grafik 3.6 Perbandingan Nilai SAKIP Bappeda Prov. Sumbar dengan Kementerian PPN/Bappenas



Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian PPN Bappenas

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah dilakukan. Dalam upaya pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, terdapat beberapa faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, diantaranya :

1. Perencanaan Kinerja

- Penetapan SK Tim Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk mengkoordinir peningkatan akuntabilitas kinerja secara berjenjang dilingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
- Melakukan dialog kinerja agar masing-masing individu memiliki kontribusi yang terukur dalam pencapaian kinerja organisasi.
- Menyusun SKP dan Rencana Aksi individu yang mencantumkan target kinerja secara periodik untuk mengawal pencapaian kinerja.
- Melakukan penyempurnaan cascading kinerja secara berjenjang untuk memudahkan dalam menyusun MPH setiap individu.
- Dokumen perencanaan telah disusun berdasarkan analisis kondisi dan capaian tahun sebelumnya, sehingga mampu menjawab permasalahan dan isu strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan kinerja secara berjenjang oleh masing-masing atasan langsung di setiap unit kerja, melalui penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) setiap bulannya. Penilaian tersebut selanjutnya menjadi dasar penerimaan Tambahan Penghasilan Prestasi atau TPP
- Meningkatkan kualitas manajemen kinerja di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.

2. Pengukuran Kinerja

- Menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat dengan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai tolok ukur dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya didalam Renja Tahun 2025 dan Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
- Indikator Kinerja Sasaran Strategis Bappeda Indeks Kualitas Perencanaan telah menjadi dasar bagi seluruh ASN Bappeda didalam menetapkan target kinerja dan rencana aksi kinerja pada SKP masing-masing individu secara berjenjang.
- Pemberian Reward untuk ASN Terbaik melalui aplikasi PEKA berbasis Android setiap bulannya dan Pemberian Punishment bagi ASN yang tidak bisa memenuhi target kinerja dengan melakukan pengurangan TPP.
- Memanfaatkan e-sakip untuk pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.
- Pengembangan Sakato Plan dalam memenuhi ketersediaan data yang dibutuhkan dalam pengukuran sasaran kinerja Indeks Kualitas Perencanaan.

3. Pelaporan Kinerja

- Memutakhirkan Pelaporan Kinerja sesuai hasil rekomendasi SAKIP dengan menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja serta membandingkan dengan hasil realisasi sebelumnya dan membandingkan dengan realisasi nasional untuk semua indikator kinerja sasaran.
- Pada pelaporan kinerja telah disajikan perhitungan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam bentuk data rill dengan menggunakan perhitungan tingkat efisiensi sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021.
- Kondisi kinerja tahun sebelumnya yang telah dituangkan dalam laporan kinerja telah ditindaklanjuti menjadi target kinerja SKP dan rencana aksi

individu Tahun 2025 oleh seluruh ASN secara berjenjang berdasarkan dialog kinerja.

4. Evaluasi Internal

- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh seluruh Bidang dan Sekretariat pada setiap Triwulan untuk memastikan target indikator di Bappeda Provinsi Sumatera Barat tercapai dengan baik. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan pada periode selanjutnya, sehingga target indikator yang telah ditetapkan pada RENSTRA maupun RENJA Bappeda Provinsi Sumatera Barat dapat tercapai.
- Menginput realisasi kinerja organisasi dalam aplikasi SAKIP Sumbar dan esr.menpan serta kinerja individu pada ekinerja BKN secara berkala setiap triwulanan.

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2024, juga terdapat beberapa **faktor yang menghambat** tercapainya sasaran kinerja ini, diantaranya :

1. Belum maksimalnya penerapan punishment terhadap pencapaian kinerja individu..
2. Belum optimalnya implementasi SPIP secara menyeluruh di Bappeda Provinsi Sumatera Barat, maka dalam menyusun konsep Perencanaan dan Penganggaran internal Bappeda sering diabaikan resiko dari penempatan penggunaan anggaran yang tidak efisien dan tidak tepat sasaran.

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di tahun 2025, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternatif upaya tindak lanjut, diantaranya :

1. Melakukan dialog kinerja secara berjenjang disertai dengan perbaikan terhadap pohon kinerja dan cascading kinerja.
2. Memastikan Komitmen bersama dalam melakukan perbaikan penerapan akuntabilitas kinerja di seluruh jajaran mulai dari Eselon 2 hingga Koordinator dan Staf dengan memaksimalkan penerapan punishment dalam pencapaian realisasi rencana aksi kinerja individu.
3. Membuat fokus substansi kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan Renja dan memberikan penganggaran sesuai dengan prioritas.

4. Rapat pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap rencana aksi dan manajemen risiko yang telah disusun secara berkala setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda
5. Memastikan segala kebijakan terkait penerapan SPIP dan Reformasi Birokrasi dapat terimplementasi sampai ke level individu.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Ekuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten terhadap Sistem AKIP

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut
Sebanyak 75 ASN Bappeda Provinsi Sumatera Barat diharapkan bisa memahami dan menguasai SAKIP	Sistem AKIP baru dipahami secara maksimal pada level Struktural, Fungsional Perencana, dan Pelaksana pada Sub Bagian Program (52 orang) atau 65% dari total ASN Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Melibatkan semua tim SAKIP pada seluruh unit kerja di masing-masing bidang untuk bisa memahami SAKIP dan mengimplementasikannya dalam menjalankan tupoksi sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat

2. Sarana dan prasarana yang memadai
Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.
3. Ketersediaan Anggaran yang efektif
Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD yang terealisasi pada tahun 2024 sebesar 84,09% dari target 81,83% dengan tingkat capaian sebesar 102,76%, didukung dengan anggaran APBD/P Provinsi Sumatera Barat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp 11.792.763.227,- dan telah terealisasi sebesar Rp 11.281.362.472,- atau sebesar 95,66%. Anggaran ini tersebar pada 2 (dua) kegiatan dengan 6 sub kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 3 sub kegiatan yaitu 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 3 sub kegiatan yaitu 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 11.792.763.227,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 102,76%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 11.281.362.472,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(Rp\ 11.792.763.227 \times 102,76\%) - Rp\ 11.281.362.472}{(Rp\ 11.792.763.227)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{Rp\ 12.118.243.492 - Rp\ 11.281.362.472}{Rp\ 11.792.763.227} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 0,07$$

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (\text{Efisiensi Kinerja}/20)) * 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (0,07 / 20)) * 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 67,74\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 67,74% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp 11.792.763.227,- yang terealisasi sebesar Rp 11.281.362.472,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan capaian indikator kinerja sebesar 102,76%. Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD :

**Tabel 3.12 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024
Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, target 81,83 dan realisasi 84,09 dengan capaian sebesar 102,76%						11.792.763.227	11.281.362.472	95,66
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					11.792.763.227	11.281.362.472	95,66
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	47.241.500	46.223.050	97,84
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	29.239.100	29.173.850	99,78
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	8.121.000	7.753.600	95,48
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	9.881.400	9.295.600	94,07
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	11.745.521.727	11.235.139.422	95,65
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 orang/bulan	74 orang/bulan	11.481.779.227	10.971.596.922	95,56
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	222.924.000	222.724.000	99,91
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan	40.818.500	40.818.500	100,00



SASARAN 2.2

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dimana pelayanan publik merupakan pilar dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean government*). Pemahaman demikian secara tematik merupakan alasan fundamental dari kehendak publik untuk menyusun perangkat hukum dalam rangka membangun pelayanan publik yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dengan paradigma baru yaitu berubahnya birokrasi sebagai yang dilayani menjadi abdi masyarakat (*pelayan masyarakat*). Hal yang sama juga menjadi misi Kepala Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang pada misi ke-7 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas.

Berdasarkan hal tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi sebagai alat ukur dalam peningkatan organisasi yang akuntabel dan melayani guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024. Pengukuran pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi yang merupakan cerminan kinerja internal Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang melayani dengan profesional diukur melalui 1 indikator kinerja sasaran yaitu Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi. Sebagaimana tertuang didalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada tahun 2024 ditetapkan dengan target sebesar 97,03%. Berdasarkan hasil Statistik Tingkat Kepuasan yang diukur melalui e-survei kepuasan yang ada di Bappeda Provinsi Sumatera Barat, indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 103,06% sebagaimana tergambar pada berikut :

Tabel 3.13 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kriteria
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	97,03	100	103,06	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja					103,06	

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2024

Sumber data indikator kinerja sasaran Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi didapat melalui hasil pada e-survei kepuasan yang ada di Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Kepuasan Tahun 2024} = \frac{\text{Persepsi Puas} + \text{Persepsi Sangat Puas}}{\text{Total Persepsi}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Kepuasan} = \frac{1742 + 2558}{4300} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Kepuasan} = 100\%$$



E-survei ini diisi oleh setiap tamu yang datang ke Bappeda terkait dengan layanan Bappeda sesuai dengan tupoksinya pada urusan perencanaan. Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat tingkat kepuasan terhadap pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2024 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tamu-tamu yang datang sudah puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Namun walaupun begitu, Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan terus memperbaiki kinerja pelayanannya baik pelayanan internal maupun eksternal.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun ini meningkat dari nilai 96,93% pada tahun 2023 menjadi 100% pada tahun 2024. Perkembangan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.7 Realisasi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat Selama Tahun 2021 s.d Tahun 2024



Sumber : Hasil E-Survei Statistik Tingkat Kepuasan Layanan Bappeda

Perbandingan Realisasi dengan Dokumen Renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, bahwa Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi melalui indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi, telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.

Tabel 3.14 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026

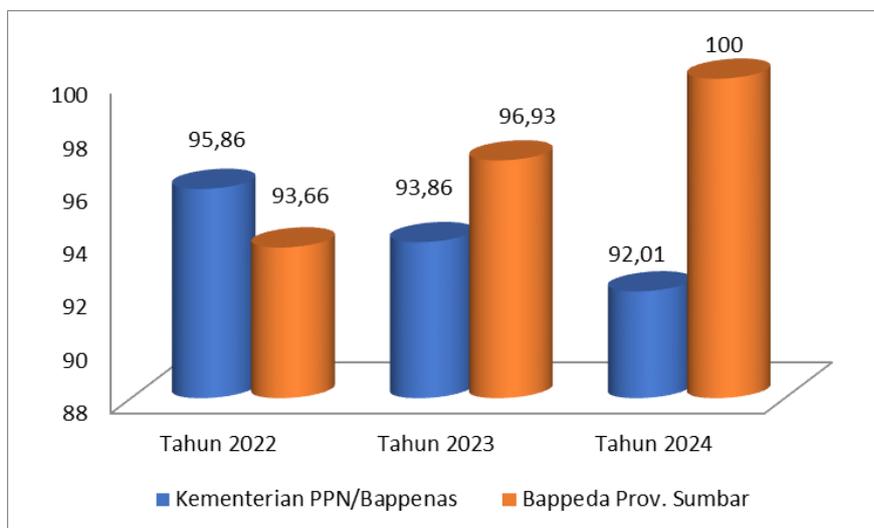
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD /Renstra	Capaian s.d Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD /Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	97,03	100	103,06	91	109,89
Rata-rata Capaian Kinerja					103,06		

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada tahun 2024 sebesar 100% telah melebihi target akhir RPJMD/Renstra yaitu dengan target akhir 91%. Dalam hal ini, Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 akan melakukan revisi terhadap target indikator kinerja ini dalam dokumen kerja tahunan (Renja).

Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional. Jika dibandingkan dengan Tingkat kepuasan layanan pada Kementerian PPN/Bappenas, nilai tingkat kepuasan terhadap pelayanan pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat berada sedikit diatas Kementerian PPN/Bappenas. Berdasarkan data dari Kementerian PPN/Bappenas diketahui nilai indeks kepuasan terhadap pelayanan Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2024 adalah 92,01% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang disebabkan karena belum seluruh unit kerja menggunakan standar kuesioner yang sama antar unit kerja dan perlu meningkatkan komunikasi dan kerja sama yang baik dengan K/L Mitra.

Grafik 3.8 Perbandingan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada Bappeda Prov. Sumbar dengan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 s.d 2024



Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah dilakukan. Dalam upaya pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, diantaranya :

1. Mengembangkan Sakato Plan untuk memudahkan Perangkat Daerah Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota dalam setiap tahapan perencanaan.
2. Melakukan perbaikan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendukung kinerja Bappeda dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, seperti perbaikan ruangan rapat dan fasilitas pendukungnya.
3. Menyempurnakan dan mengupdate berita kinerja Bappeda pada website resmi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan media sosial Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2024, juga terdapat beberapa **faktor yang menghambat** tercapainya sasaran kinerja ini, diantaranya :

1. SDM yang mengoperasikan aplikasi masih terbatas di Sekretariat.
2. Belum maksimalnya seluruh tamu Bappeda yang mengakses media survei.

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di tahun 2024, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternatif upaya tindak lanjut, diantaranya :

1. Menyesuaikan kebutuhan SDM yang mengoperasikan aplikasi untuk memperlancar operasional aplikasi yang ada.
2. Memastikan pelaksana pelayanan termasuk front office telah menerapkan budaya BerAKHLAK;
3. Melakukan evaluasi dan monitoring berkala (triwulan) dalam bentuk pertemuan/rapat internal agar dapat membuat rumusan mitigasi risiko yang ada di lingkup layanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten
Saat ini di Bappeda Provinsi Sumatera Barat terdapat 4 orang tenaga IT yang mendukung berfungsinya aplikasi Sakato Plan dalam proses perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta 28 orang tenaga pelayanan umum kantor.

2. Sarana dan prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

4. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi yang terealisasi pada tahun 2024 sebesar 100% dari target 97% dengan tingkat capaian sebesar 103,09%, didukung dengan anggaran APBD/P Provinsi Sumatera Barat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp 5.387.614.332,- dan telah terealisasi sebesar Rp 5.210.655.030,- atau sebesar 96,72%. Anggaran ini tersebar pada 6 kegiatan dengan 17 sub kegiatan.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 5.387.614.332,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 103,09%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 5.210.655.030,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(Rp\ 5.387.614.332 \times 103,09\%) - Rp\ 5.210.655.030}{(Rp\ 5.387.614.332)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{Rp\ 5.554.091.615 - Rp\ 5.210.655.030}{Rp\ 5.387.614.332} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 0,06$$

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (\text{Efisiensi Kinerja}/20)) * 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (0,06 / 20)) * 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 65,94\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 65,94% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp 5.387.614.332,- yang terealisasi sebesar Rp 5.210.655.030,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dengan capaian indikator kinerja sebesar 103,09%. Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD :

**Tabel 3.15 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024
Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi, target 97,03% dan realisasi 100% dengan capaian sebesar 103,06%								
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					5.387.614.332	5.210.655.030	96,72
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	114.454.990	110.221.443	96,30
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	105.574.490	103.207.943	97,76
				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2.275.000	2.275.000	100,00
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	6.605.500	4.738.500	71,74
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	115.500.000	114.730.000	99,33
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	154 Paket	154 Paket	115.500.000	114.730.000	99,33
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	3.031.272.597	2.904.582.701	95,82
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 Paket	22 Paket	33.892.500	33.888.600	99,99

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 paket	71.678.040	71.115.203	99,21
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	69 Paket	69 paket	106.315.300	102.486.487	96,40
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	24.240.000	24.155.900	99,65
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	2.571.646.757	2.453.936.511	95,42
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	223.500.000	219.000.000	97,99
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100%	83.435.000	74.955.000	89,84
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	5 unit	83.435.000	74.955.000	89,84
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.514.596.745	1.498.099.460	98,91
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	323.788.500	314.880.455	97,25
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.190.808.245	1.183.219.005	99,36

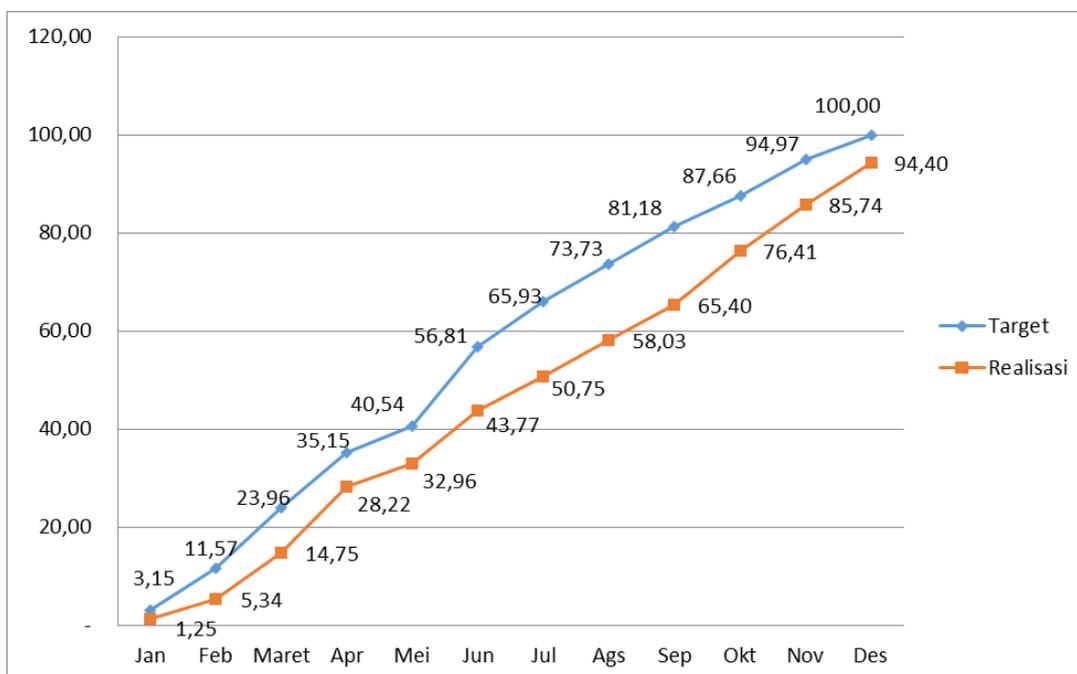
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100%	100%	528.355.000	508.066.426	96,16
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	357.400.000	346.384.247	96,92
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 unit	52 unit	50.250.000	42.730.000	85,03
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	93.455.000	91.879.229	98,31
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	28 unit	28 unit	27.250.000	27.072.950	99,35

Sumber Data : Realisasi Rencana Aksi Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, data diolah

3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun 2024, Bappeda Provinsi Sumatera Barat mendapat anggaran melalui Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 20.054.954.042,-. Anggaran tersebut tersebar di 3 program, 14 kegiatan dan 54 sub kegiatan. Hingga triwulan IV Tahun 2024, Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 18.931.696.909,- atau sebesar 94,40%. Adapun perkembangan realisasi setiap bulannya dibanding dengan target penyerapan dapat dilihat pada grafik 3.9 berikut :

Grafik 3.9 Perkembangan Realisasi Belanja dibandingkan Target Penyerapan Per Bulan Tahun 2024



Sumber : Laporan Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, diolah

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa secara umum capaian realisasi anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 belum mencapai target penyerapan setiap bulannya. Terlihat adanya gap antara target dan realisasi disetiap bulannya.

Realisasi Anggaran Per Program yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja. Salah satu indikator dalam mengukur efektivitas capaian program Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas fungsinya yaitu dengan melihat ketercapaian indikator kinerja dengan dukungan anggaran pada masing-masing program. Secara rinci, pagu alokasi setiap program dan ketercapaian penyerapan pada setiap programnya terhadap indikator kinerja sasaran strategis di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut :

**Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2024			Program	Anggaran Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	81	94,59	116,78	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.403.991.200	1.089.761.087	77,62
						Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.470.585.283	1.349.918.320	91,79
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	81,83	84,09	102,76	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.180.377.559	16.492.017.502	95,99
3	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	97,03	100	103,06				
Capaian Kinerja					107,53	Capaian Anggaran	20.054.954.042	18.931.696.909	94,40

Sumber Data : Realisasi Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, data diolah

Berdasarkan tabel 3.16 di atas, diketahui bahwa

1. Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian 3 sasaran kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 20.054.954.042,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 107,53%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 18.931.696.909,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(Rp\ 20.054.954.042 \times 107,53\%) - Rp\ 18.931.696.909}{(Rp\ 20.054.954.042)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{Rp\ 21.565.092.081 - Rp\ 18.931.696.909}{Rp\ 20.054.954.042} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 0,13$$

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (\text{Efisiensi Kinerja}/20)) * 50)$$

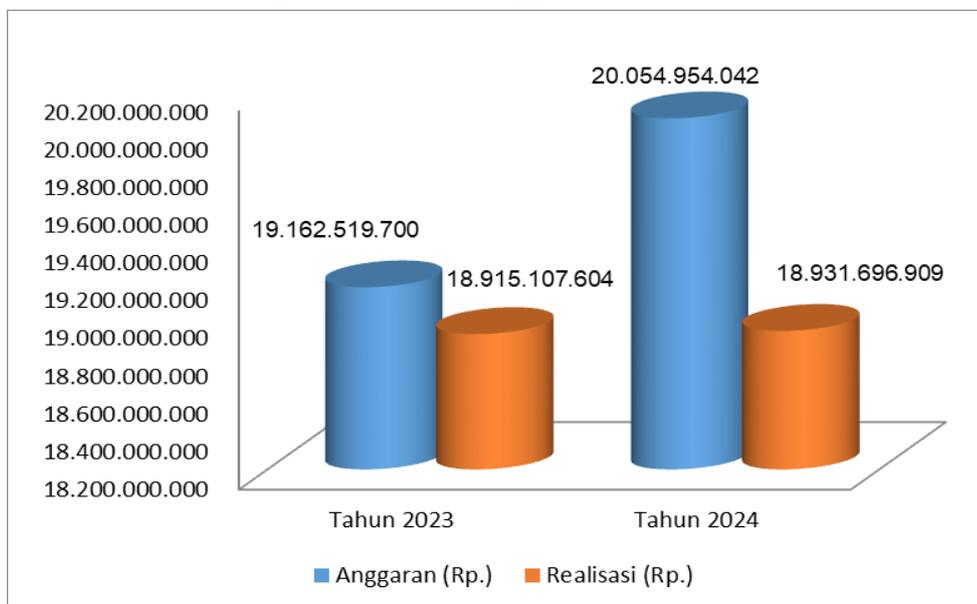
$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (0,13 / 20)*50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 82,83\%$$

2. Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 82,83% dalam mendukung pencapaian 3 sasaran strategis yang diukur melalui 3 indikator kinerja dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 107,53% Efisiensi terutama dilakukan dalam penghematan perjalanan dinas, pelaksanaan rapat koordinasi tidak menggunakan hotel tapi dilaksanakan di kantor Bappeda, serta penghematan belanja penunjang seperti ATK, cetak dan penggandaan.
3. Pada tahun 2024 serapan anggaran terbesar ada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan serapan sebesar 95,99%, berikutnya Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan serapan anggaran sebesar 91,79% dan terakhir Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan serapan anggaran sebesar 77,62%.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2023, capaian realisasi anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4,83 point, dimana realisasi anggaran pada tahun 2023 adalah sebesar 99,23% dan ditahun 2024 hanya 94,40% sebagaimana tergambar pada grafik 3.10 berikut.

Grafik 3.10 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2023



Sumber : Laporan Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, diolah

Penurunan serapan anggaran pada tahun 2024 terjadi karena adanya arahan dari Kepala Daerah untuk melakukan efisiensi belanja sehubungan dengan tidak tercapainya target pendapatan daerah. Walaupun terjadi penurunan persentase serapan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya, secara umum serapan anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 tidak menemui permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan karena secara total dalam penyerapan anggaran Bappeda dapat memenuhi target yang ditetapkan. Secara rinci realisasi anggaran per sub kegiatan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.17 sebagai berikut:

Tabel 3.17 Anggaran dan Realisasi Per Sub Kegiatan Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	17.180.377.559	16.492.017.502	95,99
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.241.500	46.223.050	97,84
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.239.100	29.173.850	99,78

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.121.000	7.753.600	95,48
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.881.400	9.295.600	94,07
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.745.521.727	11.235.139.422	95,65
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.481.779.227	10.971.596.922	95,96
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	222.924.000	222.724.000	99,91
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40.818.500	40.818.500	100,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	114.454.990	110.221.443	96,30
7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	105.574.490	103.207.943	97,76
8	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	2.275.000	2.275.000	100,00
9	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.605.500	4.738.500	71,74
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	115.500.000	114.730.000	99,33
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	115.500.000	114.730.000	99,33
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.031.272.597	2.904.582.701	95,82
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.892.500	33.888.600	99,99
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	71.678.040	71.115.203	99,21
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.315.300	102.486.487	96,40
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.240.000	24.155.900	99,65
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.571.646.757	2.453.936.511	95,42
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	223.500.000	219.000.000	97,99
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.435.000	74.955.000	89,84
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.435.000	74.955.000	89,84
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.514.596.745	1.498.099.460	98,91

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	323.788.500	314.880.455	97,25
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.190.808.245	1.183.219.005	99,36
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	528.355.000	508.066.426	96,16
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	357.400.000	346.384.247	96,92
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.250.000	42.730.000	85,03
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	93.455.000	91.879.229	98,31
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.250.000	27.072.950	99,35
II.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1.403.991.200	1.089.761.087	77,62
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.044.603.300	847.664.000	81,15
24	Pelaksanaan Konsultasi Publik	50.596.500	50.581.250	99,97
25	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	255.901.100	255.781.100	99,95
26	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	738.105.700	541.301.650	73,34
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	79.103.750	79.084.050	99,98
27	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	57.408.500	46.535.500	81,06
28	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	88.179.400	52.035.637	59,01
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	213.800.000	143.525.950	67,13
29	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	81.376.500	12.381.500	15,22
30	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	132.423.500	131.144.450	99,03

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
III	Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.470.585.283	1.349.918.320	91,79
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	624.579.100	583.414.470	93,41
31	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	95.818.200	87.213.700	91,02
32	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	38.183.800	37.362.800	97,85
33	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	67.996.300	67.125.600	98,72
34	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	21.723.100	21.693.100	99,86
35	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	91.233.100	81.974.100	89,85
36	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	31.277.700	31.275.200	99,99
37	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	85.670.400	77.399.970	90,35
38	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	192.676.500	179.370.500	93,09
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	503.304.433	448.445.050	89,10
39	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.419.250	60.350.200	99,89
40	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	31.572.900	31.567.200	99,98

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
41	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	117.581.900	110.832.050	94,26
42	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	61.315.300	37.263.000	60,77
43	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	38.470.000	38.426.000	99,89
44	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	28.720.000	28.716.000	99,99
45	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	110.087.483	103.864.000	94,33
46	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	55.137.600	37.444.600	67,91
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	345.701.750	318.058.800	92,81
47	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	59.174.000	58.390.100	98,68
48	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	36.357.300	36.103.800	99,30
49	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	42.577.800	40.165.950	94,34
50	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	28.047.300	26.477.000	94,40
51	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22.428.900	22.421.900	99,97
52	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	34.378.350	33.735.450	98,13

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			
53	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	119.738.100	100.764.600	84,15

Sumber : Laporan Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari 53 sub kegiatan hanya terdapat 11 sub kegiatan yang serapan anggarannya kurang dari 90% yang disebabkan terjadinya efisiensi belanja sesuai dengan arahan Kepala Daerah. 11 sub kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 90% tersebut secara garis besar tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan dan capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dimana sampai akhir Tahun Anggaran 2024 terlihat dengan realisasi keuangan sebesar 94,40%, sasaran strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat dapat tercapai 107,53% atau tergolong dalam kriteria Sangat Baik.

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian realisasi anggaran di tahun 2025, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternatif tindak lanjut, antara lain :

1. Membuat form pengendalian terhadap rencana aksi pada masing-masing sub kegiatan dan melakukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Menyusun rencana kerja tahunan dan rencana penarikan dana secara detail sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar tidak menumpuk di akhir tahun dan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah dibuat.
3. Memastikan kegiatan pendukung tidak lebih besar dari kegiatan utama dalam pencapaian outcome kegiatan.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan
5. Setiap Bidang adaptif terhadap kebijakan anggaran dan segera melakukan penyesuaian agar pekerjaan tidak tertunda.
6. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja yang meliputi Realisasi Rencana Aksi, Capaian Sasaran Renstra, Capaian Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Realisasi Fisik dan Keuangan secara berkala setiap awal bulan.

3.5 PENGHARGAAN TAHUN 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat ikut menunjang keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memperoleh penghargaan. Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2024 merupakan salah satu wujud pengakuan atas capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat, antara lain :

1. Masuknya Sumatera Barat dalam 12 daerah terbaik pada Event Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas setiap tahunnya. PPD merupakan evaluasi kreatif yang mengikuti kondisi aktual yang dilakukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam memberikan motivasi sekaligus apresiasi kepada pemerintah daerah yang menghasilkan perencanaan yang berkualitas, konsisten, komprehensif, dan terukur, serta dapat dilaksanakan.
2. Meraih Penghargaan Provinsi Terinovatif Terbaik 2 secara Nasional dan Terbaik 1 di Regional Sumatera untuk inovasi Dashborad Pembangunan (Inovasi Digital) pada Penganugerahan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan laporan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024. Dengan kata lain, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya pemecahan masalah untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar sasaran strategis yang ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Sebagai Instansi yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat berusaha menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dengan baik. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 yang secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa penyempurnaan langkah-langkah aksi pada masa yang akan datang. Dari Laporan Kinerja pada tahun 2024 ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Catatan rekomendasi dari Hasil evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2023 oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sudah ditindaklanjuti pada tahun anggaran 2024.
2. Secara keseluruhan, capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2024 dapat dinyatakan “berhasil”, karena realisasi 3 indikator kinerja sasaran strategisnya mencapai 100% keatas. Secara rata-rata capaian indikator kinerja Sasaran Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 107,53% dengan realisasi anggaran sebesar 94,40%.
3. Dari analisis terhadap sasaran 1, yaitu Meningkatkan Kualitas Perencanaan, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan, terealisasi 94,59 dari target 81 dengan tingkat capaian 116,78% yang berarti bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah berupaya semaksimal mungkin menjalankan tugas pokok dan fungsinya membantu Kepala Daerah dalam urusan perencanaan. Sumber data pada indikator kinerja ini adalah data kinerja masing-masing bidang yang sudah disajikan pada aplikasi sakatoplan.sumbarprov.go.id.
4. Dari analisis terhadap sasaran 2, yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, terealisasi 84,09 dari target 81,83 dengan tingkat capaian 102,76%. Dimana, pada tahun

2023 berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/19/LHE/INSP/2024 tanggal 20 Juni 2024, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai 84,09 dengan kategori "A".

5. Dari analisis terhadap sasaran 3, yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi, dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi, terealisasi 100 dari target 97,03 dengan tingkat capaian 103,06%, dalam artian bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat sudah sangat baik. Sumber data pada pada indiktaor kinerja ini adalah berdasarkan hasil e-survei kepuasan yang ada di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang diisi oleh tamu yang berkunjung ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2024.
6. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tugas Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 20.054.954.042,- dapat direalisasikan sebesar Rp 18.931.696.909,- atau sebesar 94,40%. Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, pada tahun 2024 Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 82,83%.

4.2 TINDAK LANJUT KEDEPAN

Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2025 diharapkan terus mengalami peningkatan, terutama dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, apalagi pada tahun 2025 Bappeda Provinsi Sumatera Barat dituntut untuk menghasil 3 dokumen perencanaan yaitu dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, dan dokumen Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Dalam rangka menjaga dan mencapai target kinerja tahun 2025, Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan melakukan beberapa strategi, diantaranya :

1. Mendorong dan memastikan Perangkat Daerah melakukan Forum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai Kalender Perencanaan dengan pelaksanaan pengendalian rumusan kebijakan oleh Bappeda yang mengkoordinir pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
2. Melakukan upaya perbaikan pada pelaksanaan Konsultasi Publik dan Musrenbang, diantaranya :
 - a. Pelaksanaan Konsultasi Publik dan Musrenbang dilaksanakan per tema/prioritas pembangunan dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah dan non pemerintah.

- b. Menerima masukan tidak hanya saat pelaksanaan konsultasi publik namun juga online melalui digital platform.
 - c. Melaksanakan FGD dengan Perguruan Tinggi dengan melibatkan jajaran perguruan tinggi termasuk mahasiswa serta FGD dengan tokoh-tokoh pembangunan Sumatera Barat.
3. Mengoptimalkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Kemendagri dan/atau Bappenas agar Keselarasan dalam dokumen RPJMD dan RKPD dengan dokumen RPJMN dan RKP dapat mencapai nilai yang Maksimum.
4. Memperkuat upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan dan penganggaran serta memastikan prioritas pembangunan daerah dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
5. Mengoptimalkan tindak lanjut pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui optimalisasi evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah serta kualitas hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah.
6. Mengoptimalkan pelaksanaan verifikasi dan analisis terhadap rencana kerja Perangkat Daerah dengan upaya mendorong tim verifikasi untuk hadir disetiap jadwal pembahasan, menelaah keselarasan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP, dan Menelaah Kesesuaian Isu Strategis dengan Kebutuhan Daerah.
7. Melakukan evaluasi dan monitoring berkala melalui pertemuan agar dapat membuat rumusan mitigasi risiko yang ada pada sasaran strategis Perangkat Daerah.
8. Melaksanakan pengendalian dan monitoring untuk memastikan Perangkat Daerah menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil evaluasi.

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Esselon II Tahun 2024
2. Penghargaan yang diterima Bappeda Tahun 2024
3. Matrik Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2024
4. Bukti Dukung Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang, Telp. 0751.7054555,7054374 Fax.0751.7054555
Website : bappeda.sumbarprov.go.id E-mail : bappedaprov@sumbarprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MEDI ISWANDI, ST, MM.**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MAHYELDI**
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

MAHYELDI

Padang, 19 Januari 2024
PIHAK PERTAMA

MEDI ISWANDI, ST, MM.
NIP. 19750502 199903 1 004

PERJANJIAN KINERJA

OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN : 2024

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan	1.1	Indeks Kualitas Perencanaan	81
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	2.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	81,83
3	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	3.1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	97,03

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 17.608.011.852	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 1.277.451.200	APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 2.184.080.790	APBD
4.	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Rp 967.604.000	APBN
	JUMLAH	Rp 22.037.147.842	

Padang, 19 Januari 2024

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Kepala,

Gubernur Sumatera Barat



MAHYELDI



MEDI ISWANDI, ST, MM.
NIP.19750502 199903 1 004



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah 2024

Nomor : KEP.31/M.PPN/HK/05/2024

Diberikan kepada :

Provinsi Sumatera Barat

sebagai 12 besar dengan kategori **Perencanaan dan Pencapaian Daerah** tingkat Provinsi dalam penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah 2024

Jakarta, 1 Mei 2024
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas



Suharso Monoarfa

PIAGAM PENGHARGAAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2024



**MATRIK TINDAK LANJUT REKOMENDASI SAKIP TAHUN 2024
PADA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	Komponen Penilaian	Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan untuk Perbaikan	Rencana Aksi Tindak Lanjut yang akan dilakukan terhadap Masing-Masing Rekomendasi	Target	Waktu Pelaksanaan Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian	Masalah yang dihadapi
1.	Perencanaan Kinerja Nilai : 26,74 (dari bobot 30)	Pimpinan dan unit kerja harus terus meningkatkan komitmen untuk menyusun perencanaan kinerja dan menyampaikan hasil perencanaan kinerja secara berkala dan aktif dalam pemantauan kinerja bawahannya.	1. Melakukan dialog kinerja untuk menyusun perencanaan kinerja masing-masing individu secara berjenjang.	1 dokumen MPH untuk kinerja tahun 2025	Minggu ke-1 Januari 2025	Tim Pokja Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Telah ditindaklanjuti	Tidak ada permasalahan
			2. Memastikan setiap pegawai telah menyusun SKP yang selaras dengan kinerja organisasi yang tergambar pada matriks pembagian peran hasil sehingga setiap pegawai memberikan kontribusi untuk tujuan dan sasaran kinerja organisasi	75 SKP ASN Bappeda untuk tahun 2025	Minggu ke-1 Januari 2025	Tim Pokja Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Telah ditindaklanjuti	Tidak ada permasalahan
			3. Mengidentifikasi antara data rekapitulasi dari aplikasi e-Kinerja dengan data pegawai aktif dan diikuti dengan reminder secara aktif kepada pegawai yang belum menyelesaikan proses pengelolaan kinerja.	75 orang ASN Bappeda	Oktober 2024	Tim Pokja Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Telah ditindaklanjuti	Tidak ada permasalahan
			4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan kinerja secara berjenjang oleh masing-masing atasan langsung di setiap unit kerja, melalui penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) setiap bulannya. Penilaian tersebut selanjutnya menjadi dasar penerimaan Tambahan Penghasilan Prestasi atau TPP	75 Hasil Penilaian SKP Tahun 2024	Oktober 2024 untuk Triwulan III	Tim Pokja Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Telah ditindaklanjuti	Tidak ada permasalahan
			Melakukan pembahasan kinerja rutin secara berjenjang dengan lebih intens, baik dalam rapat rutin mingguan/bulanan maupun rapat khusus membahas capaian, hambatan dan kendala kinerja yang diperjanjikan.	Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja yang dilakukan secara berkala : 1. Sewaktu-waktu ditingkat pimpinan 2. Bulanan (internal bidang dan lingkup Bappeda secara keseluruhan)	Notulen Rapat	Juli 2024	Tim Pokja Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Telah ditindaklanjuti
2.	Pengukuran Kinerja Nilai : 23,34 (dari bobot 30)	Memfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai tolok ukur yang dapat mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.	Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai tolok ukur dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya	2 Dokumen Rencana Kerja (Renja 2025 dan Perubahan Renja 2024)	Juli 2024	Tim Pokja Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Telah ditindaklanjuti	Tidak ada permasalahan

No	Komponen Penilaian	Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan untuk Perbaikan	Rencana Aksi Tindak Lanjut yang akan dilakukan terhadap Masing-Masing Rekomendasi	Target	Waktu Pelaksanaan Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian	Masalah yang dihadapi
		Pimpinan dan unit kerja berupaya meningkatkan kepedulian seluruh pegawai atas hasil pengukuran kinerja untuk peningkatan kinerja organisasi	1. Memastikan bahwa indikator kinerja individu setiap pegawai telah selaras dengan kinerja organisasi yang tergambar pada matriks pembagian peran hasil sehingga setiap pegawai memberikan kontribusi untuk tujuan dan sasaran kinerja organisasi.	1 berkas MPH dan 75 SKP ASN Bappeda untuk tahun 2025	Minggu ke-1 Januari 2025	Tim Pokja Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Telah ditindaklanjuti	Tidak ada permasalahan
			2. Memonitoring dan mengevaluasi capaian kinerja setiap pegawai secara setiap bulan oleh masing-masing atasan langsung di setiap unit kerja, melalui penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) setiap bulannya. Penilaian tersebut selanjutnya menjadi dasar penerimaan Tambahan Penghasilan Prestasi atau TPP.	75 Hasil Penilaian SKP Tahun 2024	Oktober 2024	Tim Pokja Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Telah ditindaklanjuti	Tidak ada permasalahan
3.	Pelaporan Kinerja Nilai : 12,64 (dari bobot 15)	Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja berkala (realisasi rencana aksi) dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran dan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	Memperbaiki aksi kinerja pada triwulan III dan IV serta menyesuaikan anggaran dalam pencapaian target kinerja pada tahap perubahan	1 matrik Perbaikan Rencana Aksi dan 1 dokumen perubahan anggaran Tahun 2024	Agustus 2024	Tim Pokja Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Telah ditindaklanjuti	Tidak ada permasalahan
		Menggunakan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	Rencana Kerja yang dituangkan dalam Renja Bappeda tahun berikutnya sudah disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja	1 Dokumen Renja 2025	Juli 2024	Tim Pokja Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Telah ditindaklanjuti	Tidak ada permasalahan
		Pimpinan dan seluruh unit kerja harus memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja sehingga menjadi budaya kinerja organisasi.	Kondisi kinerja tahun sebelumnya yang telah dituangkan dalam laporan kinerja ditindaklanjuti menjadi target kinerja SKP dan rencana aksi individu pada tahun berikutnya	75 SKP dan Rencana Aksi ASN Bappeda Tahun 2025	Januari 2025	Tim Pokja Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Telah ditindaklanjuti	Tidak ada permasalahan
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Nilai : 21,38 (dari bobot 25)	Melakukan pemantauan sasaran dan capaian target kinerja secara berjenjang terhadap seluruh unit kerja/bidang/sub bidang sampai level individu.	Melaksanakan rapat evaluasi kinerja (yang meliputi sasaran kinerja, serapan anggaran, manajemen kepegawaian serta sarana dan prasarana kantor) secara berjenjang, mulai dari rapat internal bidang hingga rapat pimpinan	Notulen Rapat Evaluasi	Agustus 2024	Tim Pokja Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Telah ditindaklanjuti	Tidak ada permasalahan

No	Komponen Penilaian	Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan untuk Perbaikan	Rencana Aksi Tindak Lanjut yang akan dilakukan terhadap Masing-Masing Rekomendasi	Target	Waktu Pelaksanaan Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian	Masalah yang dihadapi
		Melaksanakan pemantauan kinerja internal dengan pendalaman yang memadai, mencakup pembahasan capaian kinerja secara berjenjang sampai dengan level individu beserta hambatan, kendala dan pembahasan rencana penyesuaian aktivitas untuk periode berikutnya.	Melaksanakan rapat evaluasi kinerja (yang meliputi sasaran kinerja, serapan anggaran, manajemen kepegawaian serta sarana dan prasarana kantor) secara berjenjang, mulai dari rapat internal bidang hingga rapat pimpinan	Notulen Rapat Evaluasi	Agustus 2024	Tim Pokja Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Telah ditindaklanjuti	Tidak ada permasalahan
		Terus meningkatkan pengembangan pemakaian teknologi informasi, aplikasi dan berkoordinasi dengan Biro Organisasi agar dapat melakukan pemantauan capaian kinerja internal sampai dengan level individu.	Menginput realisasi kinerja organisasi dalam aplikasi SAKIP Sumbar dan esr.menpan serta kinerja individu pada ekinerja BKN secara berkala setiap triwulanan	1 berkas hasil input pada aplikasi SAKIP, esr Menpan dan ekinerja BKN	Oktober 2024	Tim Pokja Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Telah ditindaklanjuti	Tidak ada permasalahan
		Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh APIP untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dan dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja.	Memperbaiki aksi kinerja pada triwulan III dan IV serta menyesuaikan anggaran dalam pencapaian target kinerja pada tahap perubahan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP	1 matrik Perbaikan Rencana Aksi dan 1 dokumen perubahan anggaran Tahun 2024	Agustus 2024	Tim Pokja Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Telah ditindaklanjuti	Tidak ada permasalahan



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

**DOKUMEN HASIL PENILAIAN
INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (IPPN)
PEMERINTAH PROVINSI**

PROVINSI SUMATERA BARAT

**PENILAIAN INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (IPPN)
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH PROVINSI**

TAHUN ANGGARAN 2024

**DOKUMEN HASIL PENILAIAN
INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (IPPN)
PEMERINTAH PROVINSI
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

Total Nilai : 94,59

Predikat : Sangat Baik

Tabel 1.2 Penjabaran Kertas Kerja Penilaian IPPN Pemerintah Provinsi

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Sub-Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Data yang Disandingkan	Sumber Data yang Disandingkan	
						1 (Benchmark)	2
1. Sinergi	1.a Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	1.a.1 Keselarasan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RPJMN	1.a.1.a Tingkat Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah RPJMD dengan PN RPJMN	0,50	<ul style="list-style-type: none"> Target Tahun <i>Baseline</i>, Target Tahun Terakhir, dan Nilai Gap Target Indikator Sasaran Pembangunan (Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka) Ketersediaan Tabel Persandingan antara Sasaran Pembangunan Daerah dan Nasional Prioritas Pembangunan Daerah pada RPJMD dan Prioritas Pembangunan Nasional pada RPJMN Ketersediaan Tabel Persandingan antara Prioritas Pembangunan Daerah dan Nasional 	RPJMN Periode 5 Tahunan Level Nasional	RPJMD Periode 5 Tahunan Level Daerah
			1.a.1.b Tersedianya Tabel Persandingan antara Sasaran Pembangunan daerah RPJMD dengan PN RPJMN	0,50			
			1.a.1.c Tingkat Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan PN RPJMN	0,50			
			1.a.1.d Tersedianya Tabel Persandingan antara PN RPJMN dengan Prioritas Pembangunan Daerah	0,50			
		1.a.2 Tersedianya Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung	1.a.2.a Ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas	0,43			

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Sub-Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Data yang Disandingkan	Sumber Data yang Disandingkan	
						1 (Benchmark)	2
		Kegiatan Prioritas dalam RPJMN	dalam PN 1 (Penguatan Ekonomi dan Pertumbuhan Berkualitas) RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah		RPJMN		
			1.a.2.b Ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 2 (Pengembangan dan Pemerataan Wilayah) RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah	0,43			
			1.a.2.c Ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 3 (Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing) RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah	0,43			
			1.a.2.d Ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung	0,43			

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Sub-Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Data yang Disandingkan	Sumber Data yang Disandingkan	
						1 (Benchmark)	2
			Kegiatan Prioritas dalam PN 4 (Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan) RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah				
			1.a.2.e Ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 5 (Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar) RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah	0,43			
			1.a.2.f Ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 6 (Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim) RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah	0,43			
			1.a.2.g Ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD	0,43			

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Sub-Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Data yang Disandingkan	Sumber Data yang Disandingkan	
						1 (Benchmark)	2
			untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 7 (Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik) RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah				
		1.a.3 Indikator Makro pada RPJMD Selaras dengan Indikator Makro pada RPJMN	1.a.3.a Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	0,50	<ul style="list-style-type: none"> Target Tahun Baseline, Target Tahun Terakhir, dan Nilai Gap Target Indikator Sasaran Pembangunan (Tingkat Pengangguran Terbuka) Target Tahun Baseline, Target Tahun Terakhir, dan Nilai Gap Target Indikator Sasaran Pembangunan (Tingkat Kemiskinan) 	RPJMN Periode 5 Tahunan Level Nasional	RPJMD Periode 5 Tahunan Level Daerah
			1.a.3.b Tingkat Kemiskinan (%)	0,50			
		1.a.4 Dokumen RPJMD Selaras dengan Proyek Prioritas Strategis	-	1,00	Program Pembangunan Daerah pada RPJMD dan Proyek Prioritas Strategis (<i>Major Project</i>) pada RPJMN	RPJMN Periode 5 Tahunan Level Nasional	RPJMD Periode 5 Tahunan Level Daerah

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Sub-Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Data yang Disandingkan	Sumber Data yang Disandingkan	
						1 (Benchmark)	2
		1.a.5 Komponen SPM di RPJMD Diselaraskan dengan Komponen SPM Nasional	-	1,00	Indikator SPM Daerah pada RPJMD dan Bidang SPM Nasional pada RPJMN	PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM	RPJMD Periode 5 Tahunan Level Daerah
		1.a.6 Target SPM Daerah Diselaraskan dengan Target SPM Nasional	-	1,00	Target dan Satuan Indikator SPM Daerah pada RPJMD dan Bidang SPM Nasional pada RPJMN	PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM	RPJMD Periode 5 Tahunan Level Daerah
	1.b Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	1.b.1 Keselarasan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP	-	2,50	Data didapatkan Hasil Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	RKP Periode Tahunan Level Nasional	RKPD Periode Tahunan Level Daerah
		1.b.2 Tersedianya Dukungan Program Daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 1: Penguatan Ekonomi dan Pertumbuhan Berkualitas RKP	-	1,50	Data didapatkan Hasil Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	RKP Periode Tahunan Level Nasional	RKPD Periode Tahunan Level Daerah
		1.b.3 Tersedianya Dukungan Program Daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 2: Pengembangan dan	-	1,50	Data didapatkan Hasil Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	RKP Periode Tahunan Level Nasional	RKPD Periode Tahunan Level Daerah
			-				

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Sub-Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Data yang Disandingkan	Sumber Data yang Disandingkan	
						1 (Benchmark)	2
		Pemerataan Wilayah RKP					
		1.b.4 Tersedianya Dukungan Program Daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 3: Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP	-	1,50	Data didapatkan Hasil Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	RKP Periode Tahunan Level Nasional	RKPD Periode Tahunan Level Daerah
		1.b.5 Tersedianya Dukungan Program Daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP	-	1,50	Data didapatkan Hasil Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	RKP Periode Tahunan Level Nasional	RKPD Periode Tahunan Level Daerah
		1.b.6 Tersedianya Dukungan Program Daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 5: Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar RKP	-	1,50	Data didapatkan Hasil Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	RKP Periode Tahunan Level Nasional	RKPD Periode Tahunan Level Daerah
		1.b.7 Tersedianya Dukungan Program Daerah RKPD	-	1,50	Data didapatkan Hasil Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah	RKP Periode Tahunan Level Nasional	RKPD Periode Tahunan Level Daerah

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Sub-Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Data yang Disandingkan	Sumber Data yang Disandingkan	
						1 (Benchmark)	2
		terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 6: Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP			(PPD)		
		1.b.8 Indikator Makro pada RKPD Selaras dengan Indikator Makro pada RKP	1.b.8.a Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	0,75	<ul style="list-style-type: none"> Target Indikator Sasaran Pembangunan (Tingkat Pengangguran Terbuka) Target Indikator Sasaran Pembangunan (Tingkat Kemiskinan) 	RKP Periode Tahunan Level Nasional	RKPD Periode Tahunan Level Daerah
			1.b.8.b Tingkat Kemiskinan (%)	0,75			
	1.c Kesesuaian Anggaran Daerah (APBD) untuk Membiayai Program Prioritas Nasional / Major Project dalam Dokumen RKPD	1.c.1 Tersedianya Dukungan APBD untuk Program Prioritas Nasional / Major Project dalam Dokumen RKPD	-	10,00	APBD pada Tiap Program Pembangunan Daerah di RKPD dan Program Prioritas Pembangunan Nasional / Proyek Prioritas Strategis (Major Project) di RKP	RKP Periode Tahunan Level Nasiona	RKPD Periode Tahunan Level Daerah
2. Kualitas Perencanaan	2.a Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program / Kegiatan / Proyek di RPJMD atau	2.a.1 Kesesuaian Isu Strategis dengan Kebutuhan Daerah	2.a.1.a Keterkaitan Permasalahan daerah (Kebutuhan Daerah) dengan Hasil Evaluasi	6,00	<ul style="list-style-type: none"> Data didapatkan Hasil Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Prioritas Pembangunan Daerah 	RPJMD Periode 5 Tahunan Level Daerah	RPJMD Periode 5 Tahunan Level Daerah
			2.a.1.b Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah	6,00		atau RKPD	atau RKPD

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Sub-Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Data yang Disandingkan	Sumber Data yang Disandingkan	
						1 (Benchmark)	2
	RKPD		dengan Permasalahan Pembangunan		dan Isu Strategis Daerah	Periode Tahunan Level Daerah	Periode Tahunan Level Daerah
			2.a.1.c Penyusunan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Isu Strategis	6,00			
		2.a.2 Kesesuaian Target dan Sasaran Pembangunan dalam menyelesaikan Isu dan Prioritas Daerah	2.a.2.a Tersedianya Indikator Sasaran untuk Isu Strategis/Prioritas Pembangunan Daerah	6,00	Prioritas Pembangunan Daerah / Isu Strategis Daerah dan Indikator Sasaran Terkait	RPJMD Periode 5 Tahunan Level Daerah atau RKPD Periode Tahunan Level Daerah	RPJMD Periode 5 Tahunan Level Daerah atau RKPD Periode Tahunan Level Daerah
			2.a.2.b Tingkat Kesesuaian Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dalam Menyelesaikan Isu Strategis Daerah/Prioritas Pembangunan Daerah	8,00			
		2.a.3 Kesesuaian Program/Kegiatan/Proyek dalam Mencapai Target dan Sasaran Program	2.a.3.a Prioritas Pembangunan Daerah Dijabarkan Menjadi Program Prioritas	8,50	<ul style="list-style-type: none"> • Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas • Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Indikator Kinerja Program Prioritas 	RPJMD Periode 5 Tahunan Level Daerah atau RKPD Periode Tahunan Level Daerah	RPJMD Periode 5 Tahunan Level Daerah atau RKPD Periode Tahunan Level Daerah
			2.a.3.b Tingkat Keterkaitan Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dengan Indikator Kinerja Program Prioritas	8,50			

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Sub-Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Data yang Disandingkan	Sumber Data yang Disandingkan	
						1 (<i>Benchmark</i>)	2
	2.b Inovasi Perencanaan Pembangunan	2.b.1 Keterkaitan Permasalahan dengan Inovasi yang Dilaksanakan	-	4,50	Data didapatkan Hasil Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	-	-
		2.b. 2 Keterkaitan <i>Output</i> dengan <i>Outcome</i> Inovasi	-	4,50	Data didapatkan Hasil Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	-	-
3.Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	3.a Target dan Sasaran Pembangunan daerah Menjadi Target dan Sasaran Kinerja Lembaga terkait	3.a.1 <i>Cascading</i> Target Pembangunan Daerah menjadi Target Kinerja Lembaga Terkait di dalam Pemerintah Daerah	3.a.1.a Tersedianya Penanggungjawab OPD untuk Masing-masing Program Prioritas	5,00	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Program Prioritas Pembangunan Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah, OPD Penanggungjawab Target Indikator Kinerja / Outcome pada RPJMD / RKPD dan Target IKU OPD pada Renstra / Renja OPD 	RPJMD Periode 5 Tahunan Level Daerah atau RKPD Periode Tahunan Level Daerah	Renstra OPD Periode 5 Tahunan Level Dinas atau Renja OPD Periode Tahunan Level Dinas
			3.a.1.b Target dan Sasaran Prioritas Daerah Menjadi IKU OPD yang Bertanggungjawab	5,00			

2. DATA DAN REKAP HASIL PENILAIAN

2.1 Ketersediaan Dokumen/Data untuk Pemerintah Provinsi

Nama Provinsi : Sumatera Barat				
Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Ketersediaan Dokumen	
			Dokumen 1	Dokumen 2
1. Sinergi	1.a	1.a.1	RPJMN 2020 - 2024 (Tersedia)	RPJMD 2021 - 2026 (Tersedia)
		1.a.2	RPJMN 2020 - 2024 (Tersedia)	RPJMD 2021 - 2026 (Tersedia)
		1.a.3	RPJMN 2020 - 2024 (Tersedia)	RPJMD 2021 - 2026 (Tersedia)
		1.a.4	RPJMN 2020 - 2024 (Tersedia)	RPJMD 2021 - 2026 (Tersedia)
		1.a.5	RPJMN 2020 - 2024 (Tersedia)	RPJMD 2021 - 2026 (Tersedia)
		1.a.6	RPJMN 2020 - 2024 (Tersedia)	RPJMD 2021 - 2026 (Tersedia)
	1.b	1.b.1	PPD (Tersedia)	
		1.b.2	PPD (Tersedia)	
		1.b.3	PPD (Tersedia)	
		1.b.4	PPD (Tersedia)	
		1.b.5	PPD (Tersedia)	
		1.b.6	PPD (Tersedia)	
		1.b.7	PPD (Tersedia)	
	1.b.8	RKP 2024 (Tersedia)	RKPD 2024 (Tersedia)	
1.c	1.c.1	RKP 2024 (Tersedia)	RKPD 2024 (Tersedia)	
2. Kualitas Perencanaan	2.a	2.a.1 (a dan b)	PPD (Tersedia)	
		2.a.1 (c)	RPJMD 2021 - 2026 (Tersedia)	
		2.a.2	RKPD 2024 (Tersedia)	
		2.a.3	RKPD 2024 (Tersedia)	
	2.b	2.b.1	PPD (Tersedia)	
		2.b.2	PPD (Tersedia)	
3. Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	3.a	3.a.1	RKPD 2024 (Tersedia)	Renstra OPD (Ada Semua)

2.2 Rekap Hasil Penilaian IPPN Pemerintah Provinsi

Nama Provinsi	: Sumatera Barat
Total Nilai	: 94,59
Predikat	: Baik

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Sub-Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Rata-Rata Keselarasan Terbobot
1. Sinergi	1.a Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	1.a.1 Keselarasan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RPJMN	1.a.1.a Tingkat Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah RPJMD dengan PN RPJMN	0,50	0,28
			1.a.1.b Tersedianya Tabel Persandingan antara Sasaran Pembangunan daerah RPJMD dengan PN RPJMN	0,50	0,50
			1.a.1.c Tingkat Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan PN RPJMN	0,50	0,50
			1.a.1.d Tersedianya Tabel Persandingan antara PN RPJMN dengan Prioritas Pembangunan Daerah	0,50	0,50
		1.a.2 Tersedianya Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam RPJMN	1.a.2.a Ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 1 (Penguatan Ekonomi dan Pertumbuhan Berkualitas) RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah	0,43	0,43
			1.a.2.b Ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 2 (Pengembangan dan Pemerataan Wilayah) RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah	0,43	0,43

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Sub-Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Rata-Rata Keselarasan Terbobot
			1.a.2.c Ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 3 (Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing) RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah	0,43	0,43
			1.a.2.d Ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 4 (Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan) RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah	0,43	0,43
			1.a.2.e Ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 5 (Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar) RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah	0,43	0,43
			1.a.2.f Ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 6 (Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim) RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah	0,43	0,43

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Sub-Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Rata-Rata Keselarasan Terbobot
			1.a.2.g Ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 7 (Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik) RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah	0,43	0,26
		1.a.3 Indikator Makro pada RPJMD Selaras dengan Indikator Makro pada RPJMN	1.a.3.a Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	0,50	0,27
			1.a.3.b Tingkat Kemiskinan (%)	0,50	0,29
		1.a.4 Dokumen RPJMD Selaras dengan Proyek Prioritas Strategis	-	1,00	1,00
		1.a.5 Komponen SPM di RPJMD Diselaraskan dengan Komponen SPM Nasional	-	1,00	1,00
		1.a.6 Target SPM Daerah Diselaraskan dengan Target SPM Nasional	-	1,00	1,00
	1.b Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	1.b.1 Keselarasan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP	-	2,50	2,08
		1.b.2 Tersedianya Dukungan Program Daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 1: Penguatan Ekonomi dan Pertumbuhan	-	1,50	1,50

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Sub-Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Rata-Rata Keselarasan Terbobot
		Berkualitas RKP			
		1.b.3 Tersedianya Dukungan Program Daerah RKP terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 2: Pengembangan dan Pemerataan Wilayah RKP	-	1,50	1,35
		1.b.4 Tersedianya Dukungan Program Daerah RKP terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 3: Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP	-	1,50	1,20
		1.b.5 Tersedianya Dukungan Program Daerah RKP terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP	-	1,50	1,50
		1.b.6 Tersedianya Dukungan Program Daerah RKP terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 5: Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar RKP	-	1,50	1,50
		1.b.7 Tersedianya Dukungan Program Daerah RKP terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 6: Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan	-	1,50	1,20

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Sub-Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Rata-Rata Keselarasan Terbobot
		Perubahan Iklim RKP			
		1.b.8 Indikator Makro pada RKPD Selaras dengan Indikator Makro pada RKP	1.b.8.a Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	0,75	0,75
			1.b.8.b Tingkat Kemiskinan (%)	0,75	0,49
	1.c Kesesuaian Anggaran Daerah (APBD) untuk Membiayai Program Prioritas Nasional / Major Project dalam Dokumen RKPD	1.c.1 Tersedianya Dukungan APBD untuk Program Prioritas Nasional / Major Project dalam Dokumen RKPD	-	10,00	10,00
2. Kualitas Perencanaan	2.a Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program / Kegiatan / Proyek di RPJMD atau RKPD	2.a.1 Kesesuaian Isu Strategis dengan Kebutuhan Daerah	2.a.1.a Keterkaitan Permasalahan daerah (Kebutuhan Daerah) dengan Hasil Evaluasi	6,00	5,28
			2.a.1.b Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan	6,00	4,40
			2.a.1.c Penyusunan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Isu Strategis	6,00	6,00
		2.a.2 Kesesuaian Target dan Sasaran Pembangunan dalam menyelesaikan Isu dan Prioritas Daerah	2.a.2.a Tersedianya Indikator Sasaran untuk Isu Strategis/Prioritas Pembangunan Daerah	6,00	6,00
			2.a.2.b Tingkat Kesesuaian Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dalam Menyelesaikan Isu Strategis Daerah/Prioritas Pembangunan Daerah	8,00	8,00
		2.a.3 Kesesuaian Program/Kegiatan /Proyek dalam Mencapai Target dan Sasaran Program	2.a.3.a Prioritas Pembangunan Daerah Dijabarkan Menjadi Program Prioritas	8,50	8,50

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Sub-Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Rata-Rata Keselarasan Terbobot
			2.a.3.b Tingkat Keterkaitan Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dengan Indikator Kinerja Program Prioritas	8,50	8,50
	2.b Inovasi Perencanaan Pembangunan	2.b.1 Keterkaitan Permasalahan dengan Inovasi yang Dilaksanakan	-	4,50	4,50
		2.b. 2 Keterkaitan <i>Output</i> dengan <i>Outcome</i> Inovasi	-	4,50	3,66
3.Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	3.a Target dan Sasaran Pembangunan daerah Menjadi Target dan Sasaran Kinerja Lembaga terkait	3.a.1 <i>Cascading</i> Target Pembangunan Daerah menjadi Target Kinerja Lembaga Terkait di dalam Pemerintah Daerah	3.a.1.a Tersedianya Penanggungjawab OPD untuk Masing-masing Program Prioritas	5,00	5,00
			3.a.1.b Target dan Sasaran Prioritas Daerah Menjadi IKU OPD yang Bertanggungjawab	5,00	5,00

3. ANALISIS HASIL PENILAIAN PERENCANAAN PEMERINTAH PROVINSI

3.1 Penilaian Aspek Sinergi (1.a.1) Keselarasan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RPJMN

Penilaian Aspek Sinergi (1.a.1) memiliki bobot 2. Hasil akhir penilaian pada Aspek Sinergi (1.a.1) dapat diberikan predikat yang mengacu kepada kriteria rentang penilaian dan predikat yang tertuang pada Surat Edaran (SE) sebelumnya. Predikat tersebut didasarkan pada hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.a.1). Pemingkatan predikat tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.1 Kriteria Predikat Penilaian pada Aspek Sinergi (1.a.1)

Predikat	Rentang Nilai	Nilai Rata-rata Keselarasan Terbobot
		(Bobot 2)
Sangat Baik	91,00 - 100,00	1,82 - 2,00
Baik	81,00 - 90,99	1,62 - 1,81
Cukup Baik	71,00 - 80,99	1,42 - 1,61
Kurang	61,00 - 70,99	1,22 - 1,41
Sangat Kurang	≤ 60,99	≤ 1,21

Hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot pada setiap sub-sub indikator yang ada di Aspek Sinergi (1.a.1) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Sub-sub indikator 1.a.1.a Tingkat Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah RPJMD dengan PN RPJMN memiliki nilai rata-rata keselarasan terbobot sebesar 0,28 dari nilai maksimumnya sebesar 0,50.
2. Sub-sub indikator 1.a.1.b Tersedianya Tabel Persandingan antara Sasaran Pembangunan daerah RPJMD dengan PN RPJMN memiliki nilai rata-rata keselarasan sebesar 0,50 dari nilai maksimumnya sebesar 0,50.
3. Sub-sub indikator 1.a.1.c Tingkat Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan PN RPJMN memiliki nilai rata-rata keselarasan terbobot sebesar 0,50 dari nilai maksimumnya sebesar 0,50.

4. Sub-sub indikator 1.a.1.d Tersedianya Tabel Persandingan antara PN RPJMN dengan Prioritas Pembangunan Daerah memiliki nilai rata-rata keselarasan terbobot sebesar 0,50 dari nilai maksimumnya sebesar 0,50.

Berdasarkan nilai rata-rata keselarasan terbobot pada seluruh sub-sub indikator diatas, maka nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.a.1) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah 1,78 dari nilai maksimumnya sebesar 2,00. Berdasarkan hasil tersebut, maka keselarasan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RPJMN dapat diberikan predikat Baik.

3.2 Penilaian Aspek Sinergi (1.a.2) Tersedianya Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam RPJMN

Penilaian Aspek Integrasi (1.a.2) memiliki bobot 3,01. Hasil akhir penilaian pada Aspek Sinergi (1.a.2) dapat diberikan predikat yang mengacu kepada kriteria rentang penilaian dan predikat yang tertuang pada Surat Edaran (SE) sebelumnya. Predikat tersebut didasarkan pada hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.a.2). Pemingkatan predikat tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.2 Kriteria Predikat Penilaian pada Aspek Sinergi (1.a.2)

Predikat	Rentang Nilai	Nilai Rata-rata Keselarasan Terbobot
		(Bobot 3,01)
Sangat Baik	91,00 - 100,00	2,74 - 3,01
Baik	81,00 - 90,99	2,44 - 2,73
Cukup Baik	71,00 - 80,99	2,14 - 2,43
Kurang	61,00 - 70,99	1,84 - 2,13
Sangat Kurang	≤ 60,99	≤ 1,83

Hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot pada setiap sub-sub indikator yang ada di Aspek Sinergi (1.a.2) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Sub-sub indikator 1.a.2.a Ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 1 (Penguatan Ekonomi dan Pertumbuhan Berkualitas) RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah memiliki nilai rata-rata keselarasan terbobot sebesar 0,43 dari nilai maksimumnya sebesar 0,43.

2. Sub-sub indikator 1.a.2.b Ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 2 (Pengembangan dan Pemerataan Wilayah) RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah memiliki nilai rata-rata keselarasan terbobot sebesar 0,43 dari nilai maksimumnya sebesar 0,43.
3. Sub-sub indikator 1.a.2.c Ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 3 (Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing) RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah memiliki nilai rata-rata keselarasan terbobot sebesar 0,43 dari nilai maksimumnya sebesar 0,43.
4. Sub-sub indikator 1.a.2.d Ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 4 (Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan) RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah memiliki nilai rata-rata keselarasan terbobot sebesar 0,43 dari nilai maksimumnya sebesar 0,43.
5. Sub-sub indikator 1.a.2.e Ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 5 (Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar) RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah memiliki nilai rata-rata keselarasan terbobot sebesar 0,43 dari nilai maksimumnya sebesar 0,43.
6. Sub-sub indikator 1.a.2.f Ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 6 (Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim) RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah memiliki nilai rata-rata keselarasan terbobot sebesar 0,43 dari nilai maksimumnya sebesar 0,43.
7. Sub-sub indikator 1.a.2.g Ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 7 (Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik) RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah memiliki nilai rata-rata keselarasan terbobot sebesar 0,26 dari nilai maksimumnya sebesar 0,43.

Berdasarkan nilai rata-rata keselarasan terbobot pada seluruh sub-sub indikator diatas, maka nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.a.2) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah 2,84 dari nilai maksimumnya sebesar 3,01. Berdasarkan hasil tersebut, maka ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam RPJMN dapat diberikan predikat Sangat Baik.

3.3 Penilaian Aspek Sinergi (1.a.3) Indikator Makro pada RPJMD Selaras dengan Indikator Makro pada RPJMN

Penilaian Aspek Sinergi (1.a.3) memiliki bobot 1. Hasil akhir penilaian pada Aspek Sinergi (1.a.3) dapat diberikan predikat yang mengacu kepada kriteria rentang penilaian dan predikat yang tertuang pada Surat Edaran (SE) sebelumnya. Predikat tersebut

didasarkan pada hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.a.3). Pemingkatan predikat tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.3 Kriteria Predikat Penilaian pada Aspek Sinergi (1.a.3)

Predikat	Rentang Nilai	Nilai Rata-rata Keselarasan Terbobot
		(Bobot 1)
Sangat Baik	91,00 - 100,00	0,91 - 1,00
Baik	81,00 - 90,99	0,81 - 0,90
Cukup Baik	71,00 - 80,99	0,71 - 0,80
Kurang	61,00 - 70,99	0,61 - 0,70
Sangat Kurang	≤ 60,99	≤ 0,60

Hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot pada setiap sub-sub indikator yang ada di Aspek Sinergi (1.a.3) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Sub-sub indikator 1.a.3.a Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki nilai rata-rata keselarasan terbobot sebesar 0,27 dari nilai maksimumnya sebesar 0,50.
2. Sub-sub indikator 1.a.3.b Tingkat Kemiskinan memiliki nilai rata-rata keselarasan terbobot sebesar 0,29 dari nilai maksimumnya sebesar 0,50.

Berdasarkan nilai rata-rata keselarasan terbobot pada seluruh sub-sub indikator diatas, maka nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.a.3) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah 0,56 dari nilai maksimumnya sebesar 1,00. Berdasarkan hasil tersebut, maka keselarasan antara Indikator Makro pada RPJMD dengan Indikator Makro pada RPJMN dapat diberikan predikat Sangat Kurang.

3.4 Penilaian Aspek Aspek Sinergi (1.a.4) Dokumen RPJMD Selaras dengan Proyek Prioritas Strategi

Penilaian Aspek Sinergi (1.a.4) memiliki bobot 1. Hasil akhir penilaian pada Aspek Sinergi (1.a.4) dapat diberikan predikat yang mengacu kepada kriteria rentang penilaian dan predikat yang tertuang pada Surat Edaran (SE) sebelumnya. Predikat tersebut didasarkan pada hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.a.4). Pemingkatan predikat tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.4 Kriteria Predikat Penilaian pada Aspek Sinergi (1.a.4)

Predikat	Rentang Nilai	Nilai Rata-rata Keselarasan Terbobot
		(Bobot 1)
Sangat Baik	91,00 - 100,00	0,91 - 1,00
Baik	81,00 - 90,99	0,81 - 0,90
Cukup Baik	71,00 - 80,99	0,71 - 0,80
Kurang	61,00 - 70,99	0,61 - 0,70
Sangat Kurang	≤ 60,99	≤ 0,60

Nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.a.4) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah 1,00 dari nilai maksimumnya sebesar 1,00. Berdasarkan hasil tersebut, maka keselarasan antara Dokumen RPJMD dengan Proyek Prioritas Strategis dapat diberikan predikat Sangat Baik.

3.5 Penilaian Aspek Sinergi (1.a.5) Komponen SPM di RPJMD Diselaraskan dengan Komponen SPM Nasional

Penilaian Aspek Sinergi (1.a.5) memiliki bobot 1. Hasil akhir penilaian pada Aspek Sinergi (1.a.5) dapat diberikan predikat yang mengacu kepada kriteria rentang penilaian dan predikat yang tertuang pada Surat Edaran (SE) sebelumnya. Predikat tersebut didasarkan pada hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.a.5). Peningkatan predikat tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.5 Kriteria Predikat Penilaian pada Aspek Sinergi (1.a.5)

Predikat	Rentang Nilai	Nilai Rata-rata Keselarasan Terbobot
		(Bobot 1)
Sangat Baik	91,00 - 100,00	0,91 - 1,00
Baik	81,00 - 90,99	0,81 - 0,90
Cukup Baik	71,00 - 80,99	0,71 - 0,80
Kurang	61,00 - 70,99	0,61 - 0,70
Sangat Kurang	≤ 60,99	≤ 0,60

Nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.a.5) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah 1,00 dari nilai maksimumnya sebesar 1,00. Berdasarkan hasil tersebut, maka keselarasan antara Komponen SPM di RPJMD dengan Komponen SPM Nasional dapat diberikan predikat Sangat Baik.

3.6 Penilaian Aspek Sinergi (1.a.6) Target SPM Daerah Diselaraskan dengan Target SPM Nasional

Penilaian Aspek Sinergi (1.a.6) memiliki bobot 1. Hasil akhir penilaian pada Aspek Sinergi (1.a.6) dapat diberikan predikat yang mengacu kepada kriteria rentang penilaian dan predikat yang tertuang pada Surat Edaran (SE) sebelumnya. Predikat tersebut didasarkan pada hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.a.6). Pemingkatan predikat tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.6 Kriteria Predikat Penilaian pada Aspek Sinergi (1.a.6)

Predikat	Rentang Nilai	Nilai Rata-rata Keselarasan Terbobot
		(Bobot 1)
Sangat Baik	91,00 - 100,00	0,91 - 1,00
Baik	81,00 - 90,99	0,81 - 0,90
Cukup Baik	71,00 - 80,99	0,71 - 0,80
Kurang	61,00 - 70,99	0,61 - 0,70
Sangat Kurang	≤ 60,99	≤ 0,60

Nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.a.6) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah 1,00 dari nilai maksimumnya sebesar 1,00. Berdasarkan hasil tersebut, maka keselarasan antara Target SPM Daerah dengan Target SPM Nasional dapat diberikan predikat Sangat Baik.

3.7 Penilaian Aspek Sinergi (1.b.1) Keselarasan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPd dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP

Penilaian Aspek Sinergi (1.b.1) memiliki bobot 2,5. Hasil akhir penilaian pada Aspek Sinergi (1.b.1) dapat diberikan predikat yang mengacu kepada kriteria rentang penilaian dan predikat yang tertuang pada Surat Edaran (SE) sebelumnya. Predikat tersebut didasarkan pada hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi

(1.b.1). Pemeringkatan predikat tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.7 Kriteria Predikat Penilaian pada Aspek Sinergi (1.b.1)

Predikat	Rentang Nilai	Nilai Rata-rata Keselarasan Terbobot
		(Bobot 2,5)
Sangat Baik	91,00 - 100,00	2,28 - 2,50
Baik	81,00 - 90,99	2,03 - 2,27
Cukup Baik	71,00 - 80,99	1,78 - 2,02
Kurang	61,00 - 70,99	1,53 - 1,77
Sangat Kurang	≤ 60,99	≤ 1,52

Nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.b.1) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah 2,08 dari nilai maksimumnya sebesar 2,50. Berdasarkan hasil tersebut, maka keselarasan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP dapat diberikan predikat Baik.

3.8 Penilaian Aspek Sinergi (1.b.2) Tersedianya Dukungan Program Daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 1: Penguatan Ekonomi dan Pertumbuhan Berkualitas RKP

Penilaian Aspek Sinergi (1.b.2) memiliki bobot 1,5. Hasil akhir penilaian pada Aspek Sinergi (1.b.2) dapat diberikan predikat yang mengacu kepada kriteria rentang penilaian dan predikat yang tertuang pada Surat Edaran (SE) sebelumnya. Predikat tersebut didasarkan pada hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.b.2). Pemeringkatan predikat tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.8 Kriteria Predikat Penilaian pada Aspek Sinergi (1.b.2)

Predikat	Rentang Nilai	Nilai Rata-rata Keselarasan Terbobot
		(Bobot 1,5)
Sangat Baik	91,00 - 100,00	1,37 - 1,50
Baik	81,00 - 90,99	1,22 - 1,36
Cukup Baik	71,00 - 80,99	1,07 - 1,21

Predikat	Rentang Nilai	Nilai Rata-rata Keselarasan Terbobot
		(Bobot 1,5)
Kurang	61,00 - 70,99	0,92 - 1,06
Sangat Kurang	≤ 60,99	≤ 0,91

Nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.b.2) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah 1,50 dari nilai maksimumnya sebesar 1,50. Berdasarkan hasil tersebut, maka ketersediaan Dukungan Program Daerah RKP terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 1: Penguatan Ekonomi dan Pertumbuhan Berkualitas RKP dapat diberikan predikat Sangat Baik.

3.9 Penilaian Aspek Sinergi (1.b.3) Tersedianya Dukungan Program Daerah RKP terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 2: Pengembangan dan Pemerataan Wilayah RKP

Penilaian Aspek Sinergi (1.b.3) memiliki bobot 1,5. Hasil akhir penilaian pada Aspek Sinergi (1.b.3) dapat diberikan predikat yang mengacu kepada kriteria rentang penilaian dan predikat yang tertuang pada Surat Edaran (SE) sebelumnya. Predikat tersebut didasarkan pada hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.b.3). Pemingkatan predikat tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.9 Kriteria Predikat Penilaian pada Aspek Sinergi (1.b.3)

Predikat	Rentang Nilai	Nilai Rata-rata Keselarasan Terbobot
		(Bobot 1,5)
Sangat Baik	91,00 - 100,00	1,37 - 1,50
Baik	81,00 - 90,99	1,22 - 1,36
Cukup Baik	71,00 - 80,99	1,07 - 1,21
Kurang	61,00 - 70,99	0,92 - 1,06
Sangat Kurang	≤ 60,99	≤ 0,91

Nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.b.3) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah 1,35 dari nilai maksimumnya sebesar 1,50. Berdasarkan hasil tersebut, maka ketersediaan Dukungan Program Daerah RKP terhadap Kegiatan

Prioritas pada PN 2: Pengembangan dan Pemerataan Wilayah RKP dapat diberikan predikat Baik.

3.10 Penilaian Aspek Sinergi (1.b.4) Tersedianya Dukungan Program Daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 3: Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP

Penilaian Aspek Sinergi (1.b.4) memiliki bobot 1,5. Hasil akhir penilaian pada Aspek Sinergi (1.b.4) dapat diberikan predikat yang mengacu kepada kriteria rentang penilaian dan predikat yang tertuang pada Surat Edaran (SE) sebelumnya. Predikat tersebut didasarkan pada hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.b.4). Pemingkatan predikat tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.10 Kriteria Predikat Penilaian pada Aspek Sinergi (1.b.4)

Predikat	Rentang Nilai	Nilai Rata-rata Keselarasan Terbobot
		(Bobot 1,5)
Sangat Baik	91,00 - 100,00	1,37 - 1,50
Baik	81,00 - 90,99	1,22 - 1,36
Cukup Baik	71,00 - 80,99	1,07 - 1,21
Kurang	61,00 - 70,99	0,92 - 1,06
Sangat Kurang	≤ 60,99	≤ 0,91

Nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.b.4) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah 1,20 dari nilai maksimumnya sebesar 1,50. Berdasarkan hasil tersebut, maka ketersediaan Dukungan Program Daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 3: Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP dapat diberikan predikat Cukup Baik.

3.11 Penilaian Aspek Sinergi (1.b.5) Tersedianya Dukungan Program Daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP

Penilaian Aspek Sinergi (1.b.5) memiliki bobot 1,5. Hasil akhir penilaian pada Aspek Sinergi (1.b.5) dapat diberikan predikat yang mengacu kepada kriteria rentang penilaian dan predikat yang tertuang pada Surat Edaran (SE) sebelumnya. Predikat

tersebut didasarkan pada hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.b.5). Pemingkatan predikat tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.11 Kriteria Predikat Penilaian pada Aspek Sinergi (1.b.5)

Predikat	Rentang Nilai	Nilai Rata-rata Keselarasan Terbobot
		(Bobot 1,5)
Sangat Baik	91,00 - 100,00	1,37 - 1,50
Baik	81,00 - 90,99	1,22 - 1,36
Cukup Baik	71,00 - 80,99	1,07 - 1,21
Kurang	61,00 - 70,99	0,92 - 1,06
Sangat Kurang	≤ 60,99	≤ 0,91

Nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.b.5) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah 1,50 dari nilai maksimumnya sebesar 1,50. Berdasarkan hasil tersebut, maka ketersediaan Dukungan Program Daerah RKP terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP dapat diberikan predikat Sangat Baik.

3.12 Penilaian Aspek Sinergi (1.b.6) Tersedianya Dukungan Program Daerah RKP terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 5: Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar RKP

Penilaian Aspek Sinergi (1.b.6) memiliki bobot 1,5. Hasil akhir penilaian pada Aspek Sinergi (1.b.6) dapat diberikan predikat yang mengacu kepada kriteria rentang penilaian dan predikat yang tertuang pada Surat Edaran (SE) sebelumnya. Predikat tersebut didasarkan pada hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.b.6). Pemingkatan predikat tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.12 Kriteria Predikat Penilaian pada Aspek Sinergi (1.b.6)

Predikat	Rentang Nilai	Nilai Rata-rata Keselarasan Terbobot
		(Bobot 1,5)
Sangat Baik	91,00 - 100,00	1,37 - 1,50
Baik	81,00 - 90,99	1,22 - 1,36
Cukup Baik	71,00 - 80,99	1,07 - 1,21
Kurang	61,00 - 70,99	0,92 - 1,06
Sangat Kurang	≤ 60,99	≤ 0,91

Nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.b.6) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah 1,50 dari nilai maksimumnya sebesar 1,50. Berdasarkan hasil tersebut, maka ketersediaan Dukungan Program Daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 5: Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar RKP dapat diberikan predikat Sangat Baik.

3.13 Penilaian Aspek Sinergi (1.b.7) Tersedianya Dukungan Program Daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 6: Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP

Penilaian Aspek Sinergi (1.b.7) memiliki bobot 1,5. Hasil akhir penilaian pada Aspek Sinergi (1.b.7) dapat diberikan predikat yang mengacu kepada kriteria rentang penilaian dan predikat yang tertuang pada Surat Edaran (SE) sebelumnya. Predikat tersebut didasarkan pada hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.b.7). Pemingkatan predikat tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.13 Kriteria Predikat Penilaian pada Aspek Sinergi (1.b.7)

Predikat	Rentang Nilai	Nilai Rata-rata Keselarasan Terbobot
		(Bobot 1,5)
Sangat Baik	91,00 - 100,00	1,37 - 1,50
Baik	81,00 - 90,99	1,22 - 1,36
Cukup Baik	71,00 - 80,99	1,07 - 1,21
Kurang	61,00 - 70,99	0,92 - 1,06
Sangat Kurang	≤ 60,99	≤ 0,91

Nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.b.7) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah 1,20 dari nilai maksimumnya sebesar 1,50. Berdasarkan hasil tersebut, maka ketersediaan Dukungan Program Daerah RKP terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 6: Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP dapat diberikan predikat Cukup Baik.

3.14 Penilaian Aspek Sinergi (1.b.8) Indikator Makro pada RKP Selaras dengan Indikator Makro pada RKP

Penilaian Aspek Sinergi (1.b.8) memiliki bobot 1,5. Hasil akhir penilaian pada Aspek Sinergi (1.b.8) dapat diberikan predikat yang mengacu kepada kriteria rentang penilaian dan predikat yang tertuang pada Surat Edaran (SE) sebelumnya. Predikat tersebut didasarkan pada hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.b.8). Pemingkatan predikat tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.14 Kriteria Predikat Penilaian pada Aspek Sinergi (1.b.8)

Predikat	Rentang Nilai	Nilai Rata-rata Keselarasan Terbobot
		(Bobot 1,5)
Sangat Baik	91,00 - 100,00	1,37 - 1,50
Baik	81,00 - 90,99	1,22 - 1,36
Cukup Baik	71,00 - 80,99	1,07 - 1,21
Kurang	61,00 - 70,99	0,92 - 1,06
Sangat Kurang	≤ 60,99	≤ 0,91

Hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot pada setiap sub-sub indikator yang ada di Aspek Sinergi (1.b.8) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Sub-sub indikator 1.b.8.a Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki nilai rata-rata keselarasan terbobot sebesar 0,75 dari nilai maksimumnya sebesar 0,75.
2. Sub-sub indikator 1.b.8.b Tingkat Kemiskinan memiliki nilai rata-rata keselarasan terbobot sebesar 0,49 dari nilai maksimumnya sebesar 0,75.

Berdasarkan nilai rata-rata keselarasan terbobot pada seluruh sub-sub indikator diatas, maka nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.b.8) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah 1,24 dari nilai maksimumnya sebesar 1,50.

Berdasarkan hasil tersebut, maka keselarasan antara Indikator Makro pada RKPD dengan Indikator Makro pada RKP dapat diberikan predikat Baik.

3.15 Penilaian Aspek Sinergi (1.c.1) Tersedianya Dukungan APBD untuk Program Prioritas Nasional/Major Project dalam Dokumen RKPD

Penilaian Aspek Sinergi (1.c.1) memiliki bobot 10. Hasil akhir penilaian pada Aspek Sinergi (1.c.1) dapat diberikan predikat yang mengacu kepada kriteria rentang penilaian dan predikat yang tertuang pada Surat Edaran (SE) sebelumnya. Predikat tersebut didasarkan pada hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.c.1). Pemingkatan predikat tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.15 Kriteria Predikat Penilaian pada Aspek Sinergi (1.c.1)

Predikat	Rentang Nilai	Nilai Rata-rata Keselarasan Terbobot
		(Bobot 10)
Sangat Baik	91,00 - 100,00	9,10 - 10,00
Baik	81,00 - 90,99	8,10 - 9,09
Cukup Baik	71,00 - 80,99	7,10 - 8,09
Kurang	61,00 - 70,99	6,10 - 7,09
Sangat Kurang	≤ 60,99	≤ 6,09

Nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (1.c.1) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah 10,0 dari nilai maksimumnya sebesar 10,00. Berdasarkan hasil tersebut, maka ketersediaan Dukungan APBD untuk Program Prioritas Nasional / *Major Project* dalam Dokumen RKPD dapat diberikan predikat Sangat Baik.

3.16 Penilaian Aspek Kualitas Perencanaan (2.a.1) Kesesuaian Isu Strategis dengan Kebutuhan Daerah

Penilaian Aspek Kualitas Perencanaan (2.a.1) memiliki bobot 18. Hasil akhir penilaian pada Aspek Kualitas Perencanaan (2.a.1) dapat diberikan predikat yang mengacu kepada kriteria rentang penilaian dan predikat yang tertuang pada Surat Edaran (SE) sebelumnya. Predikat tersebut didasarkan pada hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Kualitas Perencanaan (2.a.1). Pemingkatan predikat tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.16 Kriteria Predikat Penilaian pada Aspek Kualitas Perencanaan (2.a.1)

Predikat	Rentang Nilai	Nilai Rata-rata Keselarasan Terbobot
		(Bobot 18)
Sangat Baik	91,00 - 100,00	16,38 - 18,00
Baik	81,00 - 90,99	14,58 - 16,37
Cukup Baik	71,00 - 80,99	12,78 - 14,57
Kurang	61,00 - 70,99	10,98 - 12,77
Sangat Kurang	≤ 60,99	≤ 10,97

Hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot pada setiap sub-sub indikator yang ada di Aspek Kualitas Perencanaan (2.a.1) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Sub-sub indikator 2.a.1.a Keterkaitan Permasalahan daerah (Kebutuhan Daerah) dengan Hasil Evaluasi memiliki nilai rata-rata keselarasan terbobot sebesar 5,28 dari nilai maksimumnya sebesar 6,00.
2. Sub-sub indikator 2.a.1.b Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan memiliki nilai rata-rata keselarasan terbobot sebesar 4,40 dari nilai maksimumnya sebesar 6,00.
3. Sub-sub indikator 2.a.1.c Penyusunan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Isu Strategi memiliki nilai rata-rata keselarasan terbobot sebesar 6,00 dari nilai maksimumnya sebesar 6,00.

Berdasarkan nilai rata-rata keselarasan terbobot pada seluruh sub-sub indikator diatas, maka nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Kualitas Perencanaan (2.a.1) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah 15,68 dari nilai maksimumnya sebesar 18,00. Berdasarkan hasil tersebut, maka kesesuaian Isu Strategis dengan Kebutuhan Daerah dapat diberikan predikat Baik.

3.17 Penilaian Aspek Kualitas Perencanaan (2.a.2) Kesesuaian Target dan Sasaran Pembangunan dalam Menyelesaikan Isu dan Prioritas Daerah

Penilaian Aspek Kualitas Perencanaan (2.a.2) memiliki bobot 14. Hasil akhir penilaian pada Aspek Kualitas Perencanaan (2.a.2) dapat diberikan predikat yang mengacu kepada kriteria rentang penilaian dan predikat yang tertuang pada Surat Edaran (SE) sebelumnya. Predikat tersebut didasarkan pada hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot

untuk Aspek Kualitas Perencanaan (2.a.2). Pemingkatan predikat tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.17 Kriteria Predikat Penilaian pada Aspek Kualitas Perencanaan (2.a.2)

Predikat	Rentang Nilai	Nilai Rata-rata Keselarasan Terbobot
		(Bobot 14)
Sangat Baik	91,00 - 100,00	12,74 - 14,00
Baik	81,00 - 90,99	11,34 - 12,73
Cukup Baik	71,00 - 80,99	9,94 - 11,33
Kurang	61,00 - 70,99	8,54 - 9,93
Sangat Kurang	≤ 60,99	≤ 8,53

Hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot pada setiap sub-sub indikator yang ada di Aspek Kualitas Perencanaan (2.a.2) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Sub-sub indikator 2.a.2.a Tersedianya Indikator Sasaran untuk Isu Strategis/Prioritas Pembangunan Daerah memiliki nilai rata-rata keselarasan terbobot sebesar 6,00 dari nilai maksimumnya sebesar 6,00.
2. Sub-sub indikator 2.a.2.b Tingkat Kesesuaian Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dalam Menyelesaikan Isu Strategis Daerah/Prioritas Pembangunan Daerah memiliki nilai rata-rata keselarasan terbobot sebesar 8,00 dari nilai maksimumnya sebesar 8,00.

Berdasarkan nilai rata-rata keselarasan terbobot pada seluruh sub-sub indikator diatas, maka nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Kualitas Perencanaan (2.a.2) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah 14,00 dari nilai maksimumnya sebesar 14,00. Berdasarkan hasil tersebut, maka kesesuaian Target dan Sasaran Pembangunan dalam menyelesaikan Isu dan Prioritas Daerah dapat diberikan predikat Sangat Baik.

3.18 Penilaian Aspek Kualitas Perencanaan (2.a.3) Kesesuaian Program/Kegiatan/Proyek dalam Mencapai Target dan Sasaran Program

Penilaian Aspek Kualitas Perencanaan (2.a.3) memiliki bobot 17. Hasil akhir penilaian pada Aspek Kualitas Perencanaan (2.a.3) dapat diberikan predikat yang mengacu kepada kriteria rentang penilaian dan predikat yang tertuang pada Surat Edaran (SE)

sebelumnya. Predikat tersebut didasarkan pada hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Kualitas Perencanaan (2.a.3). Pemingkatan predikat tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.18 Kriteria Predikat Penilaian pada Aspek Kualitas Perencanaan (2.a.3)

Predikat	Rentang Nilai	Nilai Rata-rata Keselarasan Terbobot
		(Bobot 17)
Sangat Baik	91,00 - 100,00	15,47 - 17,00
Baik	81,00 - 90,99	13,07 - 15,46
Cukup Baik	71,00 - 80,99	12,07 - 13,76
Kurang	61,00 - 70,99	10,37 - 12,06
Sangat Kurang	≤ 60,99	≤ 10,36

Hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot pada setiap sub-sub indikator yang ada di Aspek Kualitas Perencanaan (2.a.3) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Sub-sub indikator 2.a.3.a Prioritas Pembangunan Daerah Dijabarkan Menjadi Program Prioritas memiliki nilai rata-rata keselarasan terbobot sebesar 8,50 dari nilai maksimumnya sebesar 8,50.
2. Sub-sub indikator 2.a.3.b Tingkat Keterkaitan Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dengan Indikator Kinerja Program Prioritas memiliki nilai rata-rata keselarasan terbobot sebesar 8,50 dari nilai maksimumnya sebesar 8,50.

Berdasarkan nilai rata-rata keselarasan terbobot pada seluruh sub-sub indikator diatas, maka nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Kualitas Perencanaan (2.a.3) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah 17,00 dari nilai maksimumnya sebesar 17,00. Berdasarkan hasil tersebut, maka kesesuaian Program/Kegiatan/Proyek dalam Mencapai Target dan Sasaran Program dapat diberikan predikat Sangat Baik.

3.19 Penilaian Aspek Kualitas Perencanaan (2.b.1) Keterkaitan Permasalahan dengan Inovasi yang Dilaksanakan

Penilaian Aspek Kualitas Perencanaan (2.b.1) memiliki bobot 4,5. Hasil akhir penilaian pada Aspek Kualitas Perencanaan (2.b.1) dapat diberikan predikat yang mengacu kepada kriteria rentang penilaian dan predikat yang tertuang pada Surat Edaran (SE) sebelumnya. Predikat tersebut didasarkan pada hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot

untuk Aspek Kualitas Perencanaan (2.b.1). Pemeringkatan predikat tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.19 Kriteria Predikat Penilaian pada Aspek Kualitas Perencanaan (2.b.1)

Predikat	Rentang Nilai	Nilai Rata-rata Keselarasan Terbobot
		(Bobot 4,5)
Sangat Baik	91,00 - 100,00	4,10 - 4,50
Baik	81,00 - 90,99	3,65 - 4,09
Cukup Baik	71,00 - 80,99	3,18 - 3,64
Kurang	61,00 - 70,99	2,75 - 3,19
Sangat Kurang	≤ 60,99	≤ 2,74

Nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (2.b.1) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah 4,50 dari nilai maksimumnya sebesar 4,50. Berdasarkan hasil tersebut, maka keterkaitan Permasalahan dengan Inovasi yang Dilaksanakan dapat diberikan predikat Sangat Baik.

3.20 Penilaian Aspek Kualitas Perencanaan (2.b.2) Keterkaitan Output dengan Outcome Inovasi

Penilaian Aspek Kualitas Perencanaan (2.b.2) memiliki bobot 4,5. Hasil akhir penilaian pada Aspek Kualitas Perencanaan (2.b.2) dapat diberikan predikat yang mengacu kepada kriteria rentang penilaian dan predikat yang tertuang pada Surat Edaran (SE) sebelumnya. Predikat tersebut didasarkan pada hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Kualitas Perencanaan (2.b.2). Pemeringkatan predikat tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.20 Kriteria Predikat Penilaian pada Aspek Kualitas Perencanaan (2.b.2)

Predikat	Rentang Nilai	Nilai Rata-rata Keselarasan Terbobot
		(Bobot 4,5)
Sangat Baik	91,00 - 100,00	4,10 - 4,50
Baik	81,00 - 90,99	3,65 - 4,09
Cukup Baik	71,00 - 80,99	3,18 - 3,64
Kurang	61,00 - 70,99	2,75 - 3,19
Sangat Kurang	≤ 60,99	≤ 2,74

Nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Sinergi (2.b.2) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah 3,66 dari nilai maksimumnya sebesar 4,50. Berdasarkan hasil tersebut, maka keterkaitan *Output* dengan *Outcome* Inovasi dapat diberikan predikat Baik.

3.21 Penilaian Aspek Keterhubungan (3.a.1) *Cascading Target* Pembangunan Daerah Menjadi Target Kinerja Lembaga Terkait di dalam Pemerintah Daerah

Penilaian Aspek Keterhubungan (3.a.1) memiliki bobot 10. Hasil akhir penilaian pada Aspek Keterhubungan (3.a.1) dapat diberikan predikat yang mengacu kepada kriteria rentang penilaian dan predikat yang tertuang pada Surat Edaran (SE) sebelumnya. Predikat tersebut didasarkan pada hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Keterhubungan (3.a.1). Pemingkatan predikat tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.21 Kriteria Predikat Penilaian pada Aspek Keterhubungan (3.a.1)

Predikat	Rentang Nilai	Nilai Rata-rata Keselarasan Terbobot
		(Bobot 10)
Sangat Baik	91,00 - 100,00	9,10 - 10,00
Baik	81,00 - 90,99	8,10 - 9,09
Cukup Baik	71,00 - 80,99	7,10 - 8,09
Kurang	61,00 - 70,99	6,10 - 7,09
Sangat Kurang	≤ 60,99	≤ 6,09

Hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot pada setiap sub-sub indikator yang ada di Aspek Kualitas Perencanaan (3.a.1) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Sub-sub indikator 3.a.1.a Tersedianya Penanggungjawab OPD untuk Masing-masing Program Prioritas memiliki nilai rata-rata keselarasan terbobot sebesar 5,00 dari nilai maksimumnya sebesar 5,00.
2. Sub-sub indikator 3.a.1.b Target dan Sasaran Prioritas Daerah Menjadi IKU OPD yang Bertanggungjawab memiliki nilai rata-rata keselarasan terbobot sebesar 5,00 dari nilai maksimumnya sebesar 5,00.

Berdasarkan nilai rata-rata keselarasan terbobot pada seluruh sub-sub indikator diatas, maka nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Keterhubungan (3.a.1) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah 10,00 dari nilai maksimumnya sebesar 10,00. Berdasarkan hasil tersebut, maka kesesuaian *Cascading* Target Pembangunan Daerah menjadi Target Kinerja Lembaga Terkait di dalam Pemerintah Provinsi dapat diberikan predikat Sangat Baik.